



LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING :

**Admiral Nelson Aritonang, Ph.D
Rosilawati, S.Sos, Mps.Sp**

Oleh :

YUNI SARASATI

NRP.2003023

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Mahasiswa : YUNI SARASATI

NRP : 2003023

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing :

Pembimbing 1



Admiral Nelson Aritonang, Ph.D

Pembimbing 2



Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp

Mengetahui :

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Bandung



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia nikmat-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan dengan judul “Laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial”.

Laporan ini disusun dari hasil kegiatan praktikum laboratorium yang dimulai pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 yang berisi proses kegiatan praktikum dari tahap inisiasi sosial sampai dengan penyusunan rencana intervensi sesuai dengan 5 profil program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu analisis jaminan sosial, analisis sumber daya bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, serta analisis penanggulangan bencana.

Selesainya penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan doa berbagai pihak. Pada kesempatan ini, praktikan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
3. Ibu Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
4. Bapak Admiral Nelson Aritonang, Ph.D selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada praktikan.
5. Ibu Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada praktikan.
6. Para dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan dukungan dan ilmu bagi praktikan dan teman-teman mahasiswa Poltekesos.
7. Bapak Hendra Wardana selaku Kepala Desa Soreang yang telah menyambut praktikan dengan baik dan memberikan dukungan selama pelaksanaan praktikum.
8. Seluruh perangkat Desa Soreang yang telah memberikan informasi serta dukungan pada praktikan.
9. Ibu Tuting selaku PSM yang sudah banyak membantu praktikan dalam mencari data dan informasi.
10. Seluruh masyarakat Desa Soreang yang telah memberikan dukungan dan menerima praktikan dengan sangat baik selama praktikum.
11. Orang tua praktikan yang telah memberikan doa serta dukungan baik materiil maupun non materiil kepada praktikan.
12. Keluarga besar praktikan yang telah memberikan dukungan dan doa kepada praktikan.
13. Rekan satu kelompok yang memberikan semangat serta doa kepada praktikan.

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan praktikum laboratorium kali ini. Oleh sebab itu, dimohon kepada pembaca agar dapat memberikan saran serta masukan dalam rangka adanya perbaikan guna penyusunan laporan praktikum selanjutnya.

Praktikan berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi praktikan khususnya. Atas bantuan dan bimbingan dari segala pihak, praktikan ucapkan terimakasih.

Bandung, 20 April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR LAMPIRAN.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	2
1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum.....	3
1.4 Proses Praktikum.....	4
1.5 Sistematika Laporan.....	17
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	19
2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial.....	19
2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	40
2.3 Profil Analisis Pemberdayaan Sosial.....	63
2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	79
2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana.....	97
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	121
3.1 Kesimpulan.....	121
3.2 Rekomendasi.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

1.1 Waktu Pelaksanaan.....	3
2.1 Rincian Jumlah Penduduk.....	19
2.2 Bentuk Kegiatan.....	32
2.3 Sistem Partisipan.....	33
2.4 RAB.....	35
2.5 Alat yang Diperlukan.....	36
2.6 Uji Kelayakan Program.....	37
2.7 Jadwal dan Langkah Program.....	38
2.9 Bentuk Kegiatan.....	56
2.10 Sistem Partisipan.....	56
2.11 RAB.....	58
2.12 Alat yang Diperlukan.....	59
2.13 Uji Kelayakan Program.....	60
2.14 Jadwal dan Langkah Program.....	61
2.16 Bentuk Kegiatan.....	72
2.17 Sistem Partisipan.....	72
2.18 RAB.....	75
2.19 Alat yang Diperlukan.....	75
2.20 Uji Kelayakan Program.....	76
2.21 Jadwal dan Langkah Program.....	77
2.23 Bentuk Kegiatan.....	90
2.24 Sistem Partisipan.....	90
2.25 RAB.....	92
2.26 Alat yang Diperlukan.....	93
2.27 Uji Kelayakan Program.....	94
2.28 Jadwal dan Langkah Program.....	95
2.29 Bentuk Kegiatan.....	112
2.30 Sistem Partisipan.....	113
2.31 RAB.....	115
2.32 Alat yang Diperlukan.....	116
2.33 Uji Kelayakan Program.....	117
2.34 Jadwal dan Langkah Program.....	118

DAFTAR GAMBAR

1.1 Pembekalan Praktikum Oleh Lembaga.....	5
1.2 Pembekalan Praktikum Oleh Dosen Pembimbing.....	6
1.3 Pembekalan Profil 1.....	6
1.4 Pembekalan Profil 2.....	7
1.5 Pembekalan Profil 3.....	7
1.6 Pembekalan Profil 4.....	8
1.7 Pembekalan Profil 5.....	8
1.8 Kunjungan Pertama ke Kantor Desa Soreang.....	9
1.9 Kegiatan Pelepasan.....	10
1.10 Kegiatan CI.....	10
1.11 Kegiatan CI.....	11
1.12 Kunjungan ke Rumah PPKS.....	11
1.13 Kunjungan ke Rumah PPKS.....	11
1.14 Pertemuan dengan Ketua Karang Taruna.....	12
1.15 Kunjungan ke Rumah Anggota PEKKA.....	13
1.16 Kunjungan ke Rumah Pengelola PEKKA.....	14
1.17 Pertemuan dengan Anggota Karang Taruna.....	14
1.18 Pertemuan dengan Perangkat Desa.....	15
1.19 Konsultasi Isu Profil 1.....	15
1.20 Konsultasi Isu Profil 2.....	16
1.21 Konsultasi Isu Profil 3.....	16
1.22 Konsultasi Isu Profil 4.....	16
1.23 Konsultasi Isu Profil 5.....	17
2.1 Alur Penerimaan PBI APBD.....	23
2.2 Pohon Masalah.....	27
2.3 Pohon Masalah.....	52
2.4 Pohon Masalah.....	68
2.5 Pohon Masalah.....	85
2.6 Pohon Masalah.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampian I	: Surat Ijin Kegiatan.....	126
Lampiran II	: Rundown Kegiatan.....	128
Lampiran III	: Pedoman Wawancara.....	131
Lampiran IV	: Catatan Hasil Wawancara.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program studi perlindungan dan pemberdayaan merupakan program studi yang berdiri pada tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 436/KPT/I/2018, sebagai salah satu syarat untuk pengajuan perubahan kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial, yang kemudian diresmikan pada bulan Juli 2019. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan/atau kompetensi dalam bidang keilmuan pekerjaan sosial generalis serta mampu mempraktekannya secara profesional dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan dihasilkan untuk memiliki keunggulan meliputi aspek kemampuan kerja, kemampuan manjerial, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab, yaitu:

a. **Analisis Jaminan Sosial**

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji implementasi, mendisain program, mengaplikasikan sistem dan menyelesaikan masalah dalam sistem jaminan sosial dalam perlindungan sosial.

b. **Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial**

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana pelaksanaan model, mengaplikasikan berbagai model dan menyelesaikan masalah dalam implementasi sumber dana bantuan sosial.

c. **Analisis Pemberdayaan Sosial**

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana, mengaplikasikan berbagai model dan menyelesaikan masalah dalam pemberdayaan sosial.

d. **Analisis Penataan Lingkungan Sosial**

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penataan lingkungan sosial.

e. **Analisis Penanggulangan Bencana**

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penanggulangan bencana.

Untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial. Hal ini diaplikasikan pada Praktikum Laboratorium yang menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu sebagai Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Praktikum Laboratorium dilaksanakan dalam laboratorium indoor dan outdoor secara luring untuk dapat memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum

a. Tujuan Praktikum

Tujuan dilakukannya praktikum laboratorium bagi mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu :

- 1) Untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang sudah dipelajari sebelumnya
- 2) Untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 3) Untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
- 4) Untuk melaksanakan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam tahap : Pendekatan Awal, Asesmen, dan Perencanaan Intervensi

b. Manfaat Praktikum

- 1) Meningkatkan kompetensi mahasiswa (Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus) dalam melakukan praktik pekerjaan sosial bagi mahasiswa
- 2) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung
- 3) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung

1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum

a. Waktu Praktikum

Kegiatan praktikum dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 15 April 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Table 1.1 Waktu Praktikum

No	Rincian Kegiatan	Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembekalan Materi Analisis Jaminan Sosial	■											
2	Praktik Analisis Jaminan Sosial	■	■										
3	Supervisi		■										
4	Penyusunan Laporan			■									
5	Pembekalan Materi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial			■									
6	Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial			■	■								
7	Supervisi				■								
8	Penyusunan Laporan					■							
9	Pembekalan Materi Analisis Pemberdayaan Sosial						■						
10	Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial						■	■					
11	Supervisi							■					
12	Penyusunan Laporan							■	■				
13	Pembekalan Materi Analisis Penataan Lingkungan Sosial								■				
14	Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial								■	■			
15	Supervisi									■			

a. Kegiatan Pra Lapangan

1) Pembekalan Praktikum Laboratorium

Kegiatan pra lapangan dilakukan sebelum praktikan melaksanakan praktikum di lapangan. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 25 Januari 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023, diadakan pembekalan Praktikum Laboratorium secara Luring di Auditorium Poltekesos Bandung yang dimulai pada pukul 08.30 WIB. Pada kegiatan ini diadakan pembahasan mengenai tahapan dan tata tertib pelaksanaan praktikum.

Dalam pembekalan ini dijelaskan latar belakang bahwa praktikum laboratorium ini sebagai sarana mahasiswa meningkatkan nilai, pengetahuan serta keterampilan dalam praktik intervensi komunitas berdasarkan 5 profil lulusan yaitu analisis jaminan sosial, analisis sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial dan analisis penanggulangan bencana.

Lalu dijelaskan juga bahwa praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai, pengetahuan, keterampilan dalam penggunaan metode dan teknik serta keterampilan dalam proses intervensi masyarakat dari tahap pendekatan, asesmen dan perencanaan intervensi.

Kegiatan ini memiliki manfaat bagi mahasiswa maupun lembaga. Peserta praktikum laboratorium ini merupakan mahasiswa semester VI yang berjumlah 92 orang dan di bagi menjadi 12 Kelompok. Mahasiswa yang diizinkan untuk mengikuti kegiatan praktikum adalah mahasiswa yang sudah memenuhi 8 mata kuliah prasyarat yaitu intervensi pekerja sosial dengan komunitas, sistem perlindungan sosial, asuransi dan jaminan sosial, praktik pekerjaan sosial dengan bencana, sistem bantuan sosial, praktik pemberdayaan organisasi dan kelembagaan sosial, modal sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, serta praktik pekerjaan sosial dan lingkungan (Green Social Work). Selain itu juga dijelaskan apa saja tugas dari dosen pembimbing serta tugas praktikan serta tahapan dari kegiatan praktikum sesuai dengan rentang waktunya.



Gambar 1.1 Pembekalan Praktikum oleh Lembaga

Selain pembekalan oleh lembaga, praktikan juga mendapat pembekalan pra lapangan oleh dosen pembimbing. Dalam pembekalan tersebut, dosen pembimbing mengarahkan praktikan dalam pemilihan isu untuk tiap-tiap profil. Selain itu, praktikan juga diminta untuk memiliki satu pedoman yang berisi konsep PPKS dan tiap-tiap profil yang akan di analisis.



Gambar 1.2 Pembekalan Praktikum oleh Dosen Pembimbing

2) Pembekalan Materi Mengenai 5 Profil dari Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

a) Pembekalan profil Analisis Jaminan Sosial (2 Februari 2023)

Pembekalan ini dilakukan sebelum praktikan memulai kegiatan lapangan untuk profil pertama. Kegiatan pembekalan ini diisi oleh Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE sebagai perencana ahli muda, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas.

Materi yang disampaikan tentu berkaitan dengan jaminan sosial, mulai dari kebijakan dan struktur jaminan sosial, tantangan program jaminan sosial di Indonesia, dan potensi kontribusi lulusan jaminan sosial. Dalam materi tersebut, lebih berfokus kepada tujuan dalam memperluas kontribusi masyarakat Indonesia menjadi peserta jaminan sosial, khususnya BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 1.3 Pembekalan Profil 1

b) Pembekalan profil Sumber Dana Bantuan Sosial (22 Februari 2023)

Pembekalan ini dilakukan sebelum praktikan memulai kegiatan lapangan untuk profil kedua. Kegiatan pembekalan ini diisi oleh Bapak Tonton Heryanto sebagai salah satu lulusan Poltekesos Bandung

Pembekalan ini lebih membahas mengenai manajemen atau pengelolaan uang, di mana di dalamnya terdapat sumber dana, permasalahan dalam pengelolaan dana, dan cara menangani masalah tersebut.



Gambar 1.4 Pembekalan Profil 2

c) Pembekalan profil Pemberdayaan Sosial (8 Maret 2022)

Pembekalan ini dilakukan sebelum praktikan memulai kegiatan lapangan untuk profil ketiga. Kegiatan ini diisi oleh Bapak Samsul Maarif sebagai Project Manager Yayasan Usaha Mulia Cianjur, yang memuat materi mengenai praktik pemberdayaan sosial dan masalahnya. Menjelaskan terkait konsep pemberdayaan hingga pada tahapan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam melakukan suatu pemberdayaan.



Gambar 1.5 Pembekalan Profil 3

d) Pembekalan profil Penata Lingkungan Sosial (24 Maret 2023)

Pembekalan ini diberikan untuk menunjang pengetahuan praktikan sebelum melakukan kegiatan praktikum untuk profil Penataan Lingkungan Sosial. Pemateri dari pembekalan ini adalah Bapak Ade Reno Sudiarno, A.KS, MSW.

Materi yang diberikan memuat gambaran umum terkait dengan penataan lingkungan sosial yang dikaitkan dengan *green sosial work*, kompetensi yang dibutuhkan untuk praktek penataan lingkungan sosial, serta peluang kerja pada bidang penataan lingkungan. Materi tersebut cukup menjadi bekal praktikan untuk memulai praktikum.



Gambar 1.6 Pembekalan Profil 4

e) Pembekalan profil Penanggulangan Bencana (5 April 2023)

Pembekalan ini diberikan untuk menunjang pengetahuan praktikan sebelum melakukan kegiatan praktikum untuk profil Penanggulangan Bencana. Pemateri dari pembekalan ini adalah Mohd Robi Amri selaku perencana ahli madya BNPB Jakarta.

Dalam pembekalan tersebut, disampaikan materi terkait konsep bencana dari berbagai sudut pandang. Selain itu, dijelaskan juga terkait manajemen bencana.



Gambar 1.7 Pembekalan Profil 5

b. Kegiatan Lapangan

Kegiatan lapangan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan 15 April 2023 di Desa Soreang yang berada di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Praktikan melaksanakan tahap inisiasi sosial, assesmen dan penyusunan rencana intervensi dengan menggunakan beberapa teknik yang pernah diajarkan sebelumnya. Kegiatan lapangan meliputi praktik analis jaminan sosial, praktik sumber dana bantuan sosial, analis pemberdayaan sosial, praktik analis penataan lingkungan sosial, serta analis penanggulangan bencana.

1) Praktik Analis Jaminan Sosial

Kegiatan praktikum pertama untuk profil Analis Jaminan Sosial dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, praktikan melaksanakan inisiasi sosial dengan mengunjungi Kantor Desa Soreang. Inisiasi sosial merupakan tahap awal dalam intervensi komunitas untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, stakeholder, dan lain-lain. Disana, praktikan meminta izin sekaligus memberikan surat perizinan yang dibuat oleh Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Surat Terlampir). Hasil dari kegiatan ini, yaitu praktikan memperoleh dukungan dari pihak desa, serta pihak desa berkomitmen untuk mendukung penuh kegiatan praktikum yang akan dilaksanakan di Desa Soreang.



Gambar 1.8 Kunjungan pertama ke kantor desa

Pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, bertepatan dengan pelepasan praktikan oleh lembaga, dilanjutkan pelepasan praktikan ke Lokasi Praktikum masing-masing bersama dosen Pembimbing. Kegiatan ini dilakukan dengan kunjungan oleh praktikan dan dosen Pembimbing ke Kantor Desa Soreang, sebagai bentuk inisiasi sosial.



Gambar 1.9 Kegiatan Pelepasan

Setelah melakukan pelepasan, praktikan melanjutkan kegiatan dengan melakukan *transeckwalk* di sekitar Desa Soreang, sembari mencari tempat singgah, yang nantinya akan ditinggali oleh praktikan selama praktikum berlangsung.

Pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, praktikan kembali mengunjungi kantor desa dan langsung menemui bagian pelayanan publik, yaitu Bapak Iyus untuk melakukan wawancara terkait jaminan sosial yang ada di Desa Soreang. Selain itu, praktikan juga dikenalkan dengan PSM yang ada di Desa Soreang, yaitu Ibu Tuting. Praktikan juga melakukan wawancara dengan Ibu Tuting terkait PPKS yang ada di Desa Soreang dan terkait dengan isu-isu jaminan sosial yang ada di Desa Soreang. Ibu tuting juga memberi arahan terkait PPKS yang bisa menjadi sasaran praktikan untuk kegiatan praktikum ini.

Pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, praktikan melaksanakan *community involvement*. *Community Involvement* dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan posyandu. Dalam hal ini praktikan berbaur dengan para kader posyandu. Praktikan membantu mereka sambil menggali beberapa informasi dari narasumber, yaitu Ibu Yeni dan Ibu Nunungsebagai anggota dari PUSKESOS. Melalui kegiatan ini, praktikan menjadi lebih mengenal karakteristik masyarakat, dapat berbaur dengan masyarakat, dan sekaligus mendapatkan beberapa informasi terkait jaminan sosial.



Gambar 1.10 Kegiatan CI



Gambar 1.11 Kegiatan CI

Pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, praktikan mengunjungi PPKS yang telah diinformasikan oleh Ibu Tuting dengan didampingi oleh beliau. PPKS yang kami temui adalah Perempuan Kepala Keluarga miskin, yang masing-masing dari mereka belum mendaftarkan BPJS Kesehatan dan juga belum mendapat PBI JK.



Gambar 1.12 Kunjungan ke rumah PPKS



Gambar 1.13 Kunjungan ke rumah PPKS

2) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Setelah mendapatkan pembekalan terkait sumber dana bantuan sosial, pada hari Kamis, Tanggal 23 Februari, praktikan kembali mendatangi kantor desa, dengan tujuan menjelaskan kegiatan dan hasil yang sudah didapatkan oleh praktikan selama satu minggu sebelumnya. Selain itu tujuan lainnya tentu ingin menggali terkait bantuan sosial yang ada Di Desa Soreang. Wawancara ini dilakukan bersama Pak Iyus selaku bidang Pelayanan Publik dan Pak Rohman selaku bidang Kesejahteraan Sosial di Kantor Desa Soreang.

Dalam wawancara ini lebih berfokus pada bantuan sosial apa saja yang ada di Desa Soreang serta sumber dananya dan apa saja keluhan yang sering dirasakan oleh masyarakat terkait bantuan sosial tersebut. Selain itu, praktikan juga meminta arahan dan rekomendasi terkait *key person* yang bisa dihubungi untuk menambah informasi terkait bantuan sosial ini.

Pada hari Jumat, Tanggal 3 Maret 2023, praktikan bertemu dengan ketua dari Karang Taruna Desa Soreang, yaitu Pak Ganjar. Praktikan melakukan wawancara terkait Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Karang Taruna, berupa bantuan sosial kemasayarakatan, yang pendanaanya adalah hasil dari PUB hibah oleh masyarakat, instansi sosial, instansi kesehatan, dan industri sebagai bentuk CSR. Dalam wawancara tersebut praktikan mengulik info mengenai konsep program bantuan sosial tersebut, sistematika dan prosesnya, serta kendala yang dihadapi.



Gambar 1.14 Pertemuan dengan Ketua Karang Taruna

Dari hari wawancara tersebut, praktikan mendapatkan isu terkait Dana Bantuan Sosial, yaitu mengenai Penyelenggaraan PUB yang belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Ganjar.

3) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial

Setelah mendapat pembekalan terkait Pemberdayaan Sosial pada tanggal 8 Maret, pada hari Kamis, Tanggal 9 Maret 2023, Praktikan kembali mengunjungi Ibu Tuting selaku PSM di Desa Soreang.

Dalam Wawancara kali ini, praktikan menggali informasi terkait pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan di Desa Soreang khususnya untuk para PPKS. Selain itu, praktikan juga meminta arahan dan rekomendasi terkait sasaran yang bisa menjadi sumber informasi lainnya.

Setelah mendapat rekomendasi sasaran, praktikan didampingi Ibu Tuting, kemudian mendatangi salah satu Perempuan Kepala Keluarga Miskin, yaitu Ibu Idas selaku anggota dari program Pemberdayaan, yaitu Program Usaha oleh Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Praktikan melakukan wawancara terkait konsep dari program tersebut dan apa yang telah di rasakan setelah mendapat pemberdayaan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa PEKKA ini merupakan suatu program pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan kepala keluarga untuk melakukan suatu usaha, yaitu usaha *catering*. Beliau juga menjelaskan bahwa sudah merasa cukup terbantu oleh program tersebut.



Gambar 1.15 Kunjungan ke rumah anggota PEKKA

Pada hari Selasa, Tanggal 14 Maret 2023, praktikan mengunjungi pengelola dari program PEKKA, yaitu Ibu Eti untuk validasi dan lebih melengkapi informasi mengenai PEKKA itu sendiri. Praktikan juga mewawancarai terkait kendala-kendala selama proses usaha berlangsung. Dari Ibu Eti, praktikan juga mendapatkan informasi terkait kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan lainnya, khususnya untuk PPKS.



Gambar 1.16 Kunjungan ke rumah pengelola PEKKA

4) Praktik Analisis Penata Lingkungan Sosial

Isu terkait pemeliharaan irigasi yang kurang baik dan rencana program Karang Taruna yang sejalan dengan isu permasalahan tersebut, praktikan dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Pak Ganjar selaku ketua Karang Taruna di Desa Soreang, bersamaan dengan wawancara untuk profil Analisis Dana Bantuan Sosial, yaitu pada hari Jumat, Tanggal 3 Maret 2023.

Setelah mendapatkan pembekalan dan kembali ke lapangan, praktikan langsung menemui kembali anggota dari Karang Taruna, yaitu Pak Husni Abdullah pada Tanggal 30 Maret 2023. Wawancara dengan Pak Husni membahas terkait kondisi irigasi yang ada di Desa Soreang dan konsep rencana program yang akan dilakukan.



Gambar 1.17 Pertemuan dengan anggota Karang Taruna

Di hari yang sama, praktikan juga menemui pihak Desa, yaitu Pak Iyus selaku bidang pelayanan di Kantor Desa Soreang. Praktikan menemui Pihak desa dengan tujuan untuk melakukan Validasi terkait kondisi irigasi di Desa Soreang, serta menanyakan lebih detail mengenai isu masalah, seperti penyebab dan dampak yang dirasakan.

5) Praktik Analis Penanggulangan Bencana

Pada Tanggal 30 Maret 2023, praktikan melakukan pertemuan dengan Pak Iyus dan Pak Rohman. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas terkait bencana yang ada di Desa Soreang, baik bencana alam maupun bencana sosial.

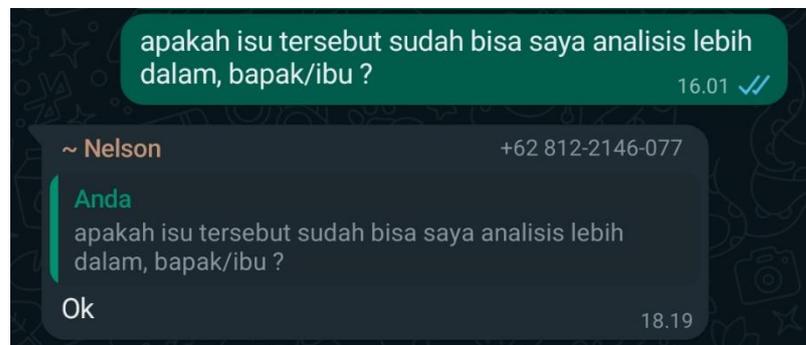
Dari pertemuan tersebut, praktikan juga menanyakan terkait, potensi bencana apa saja yang dapat menjadi ancaman bagi Desa Soreang, serta bagaimana Desa Soreang mempersiapkan hal tersebut.



Gambar 1.18 pertemuan dengan perangkat desa

c. Kegiatan Pasca Lapangan

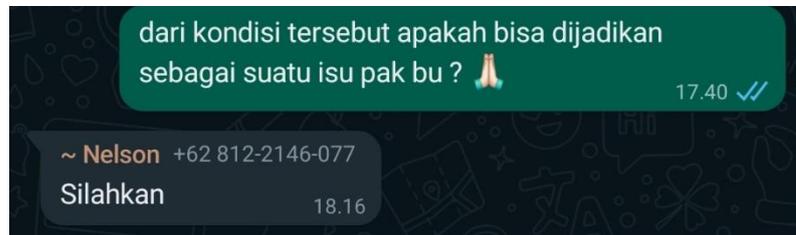
Setiap praktikan mendapatkan isu untuk tiap profil lulusan, praktikan langsung berkonsultasi dengan Bapak Nelson dan Ibu Rosilawati terkait isu tersebut, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Setelah isu tersebut disetujui, selanjutnya praktikan akan melakukan penyusunan laporan di setiap minggunya. Selain itu, hasil isu yang didapatkan juga akan dipaparkan dan direvisi melalui kegiatan supervisi lembaga. Berikut adalah dokumentasi dari proses pasca lapangan.



Gambar 1.19 Konsultasi isu profil 1

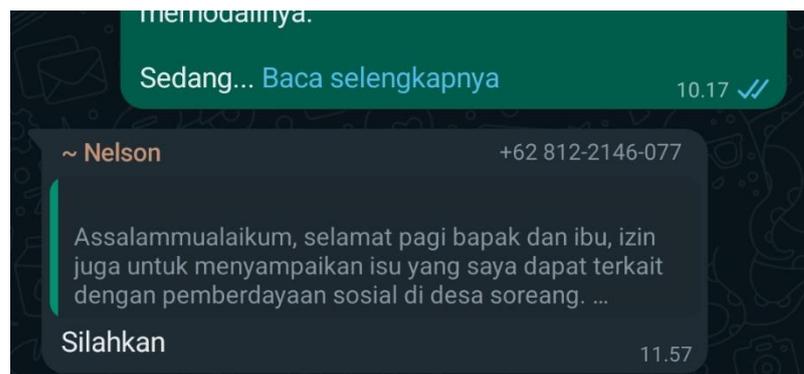
Di atas merupakan hasil konsultasi praktikan dengan dosen pembimbing, untuk membahas terkait isu jaminan sosial.

Di mana dari isu yang telah praktikan temui terkait dengan rendahnya kepesertaan PRSE dalam bantuan iuran jaminan kesehatan. Isu tersebut sudah disetujui dan dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.



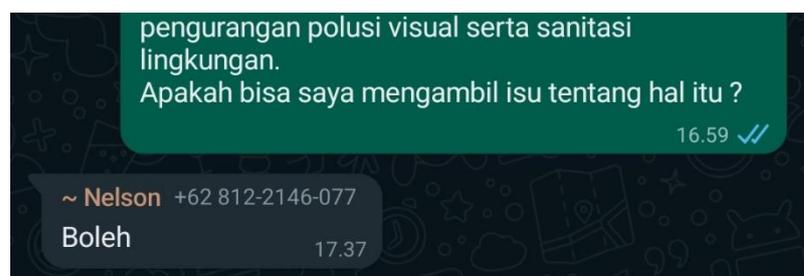
Gambar 1.20 Konsultasi isu profil 2

Di atas merupakan hasil konsultasi praktikan dengan dosen pembimbing, terkait isu Bantuan Sosial di Desa Soreang. Isu yang diajukan oleh praktikan terkait dengan penyelenggaraan Penggalangan Uang dan Barang (PUB) untuk bantuan sosial masyarakat yang belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Isu tersebut sudah disetujui dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.



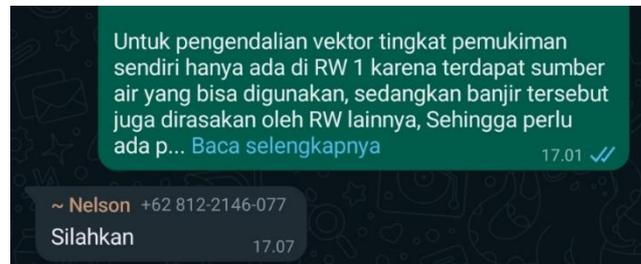
Gambar 1.21 Konsultasi isu profil 3

Di atas merupakan hasil konsultasi praktikan dengan dosen pembimbing, terkait isu Pemberdayaan Sosial di Desa Soreang. Untuk profil Analisis Pemberdayaan Sosial ini, praktikan mengajukan isu terkait dengan program usaha PEKA di Desa Soreang yang belum menerapkan manajemen usaha yang baik. Isu tersebut sudah disetujui dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.



Gambar 1.22 Konsultasi isu profil 4

Di atas merupakan hasil konsultasi praktikan dengan dosen pembimbing, terkait isu Penataan Lingkungan di Desa Soreang. Pada Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial ini, praktikan mengajukan isu terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan irigasi yang kurang baik di daerah irigasi yang ada di Desa Soreang. Isu tersebut sudah di disetujui dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.



Gambar 1.23 Konsultasi isu profil 5

Di atas merupakan hasil konsultasi praktikan dengan dosen pembimbing, terkait isu Penanggulangan Bencana di Desa Soreang. Isu yang diajukan oleh praktikan, yaitu terkait dengan manajemen usaha pasca bencana banjir dalam pengendalian vektor. Isu tersebut sudah disetujui dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelah semua isu dari tiap-tiap profil telah di setujui, kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Finalisasi Penyusunan Laporan Akhir Praktikum
- 2) Uji Lisan Praktikum
- 3) Penyerahan Laporan

1.5 Sistematika Laporan

Dalam mempermudah penulisan, maka laporan ini dibagi menjadi tiga bab dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan .

b. BAB II : Praktikum Laboratorium

Dalam bab ini, dijelaskan gambaran umum masalah yang diangkat, tinjauan konsep atau teori yang relevan dengan masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, assesmen yang berisi identifikasi masalah, penyebab masalah, dampak masalah, fokus masalah, identifikasi kebutuhan, identifikasi potensi dan sumber serta penyusunan rencana intervensi yang mencakup latar belakang, tujuan umum dan khusus, bentuk kegiatan dan program, sistem partisipan, metode dan teknik, rencana anggaran biaya beserta alat yang dibutuhkan, uji kelayakan program serta jadwal dan langkah-langkah kegiatan dari masing-masing profil yang terdiri dari profil analis jaminan sosial, analis sumber dana bantuan sosial, analis pemberdayaan sosial, analis penata lingkungan sosial, serta analis penanggulangan bencana.

c. BAB III : Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana kesimpulan laporan yang dibuat oleh praktikan serta rekomendasi yang berisi saran program apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait.

BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analis Jaminan Sosial

2.1.1 Gambaran Masalah

Jaminan sosial menurut Kertonegoro (2008), merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah. Kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 1945.

Badan penyelenggara jaminan sosial adalah BPJS, yang di dalamnya terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, yang kepesertaannya wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan untuk para pekerja dari kecelakaan kerja dan kehilangan pekerjaan.

Penyelenggaraan jaminan sosial di tiap daerah memiliki kualitas yang berbeda, baik dari kepesertaan maupun pelayanannya. Hal tersebut membuat setiap daerah memiliki masalah atau isu-isu yang berbeda pula dalam sistem jaminan sosialnya. Termasuk isu jaminan sosial yang ada di Desa Soreang.

Desa Soreang adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang praktikan dapatkan dari profil desa, bahwa terdapat jumlah penduduk Desa Soreang, yaitu 18.465 jiwa dengan rincian jenis penduduk sebagai berikut :

Table 2.1 Rincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis	Jumlah
Penduduk Laki-laki	9.431
Penduduk Perempuan	9.034
Kepala Keluarga	5.402

Sumber : Data Desa (2019)

Desa Soreang sendiri memiliki beragam isu masalah mengenai jaminan sosial itu sendiri, baik mengenai masalah jaminan Kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan.

Mulai dari isu masalah mengenai PMKS yang belum tercover jaminan Kesehatan, karena belum mendapat bantuan iuran PBI BPJS. Berdasarkan rekap data BNBA yang di dapatkan dari PSM Desa Soreang, bahwa ada beberapa jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu Disabilitas, Pemulung, Fakir Miskin, Lansia Terlantar, PSK, dan PRSE.

Selain itu, masalah terkait Jaminan Ketenagakerjaan Di Desa Soreang sendiri, yaitu tingkat kepesertaan para pekerja informalnya masih sangat rendah dalam BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

Berdasarkan Isu-isu masalah di atas, praktikan tertarik dengan isu masalah mengenai salah satu PMKS yang ada di Desa Soreang, yaitu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang belum tercover oleh Jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. PRSE itu sendiri adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi ekonomi yang rawan membuat PRSE tidak bisa mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, walaupun di kelas 3 sekalipun. Meskipun kita tau bahwa BPJS itu sendiri memiliki program yang diperuntukan khusus bagi mereka yang membutuhkan, yaitu program BPJS PBI. Namun PRSE di Desa Soreang itu sendiri masih belum terdaftar program tersebut. Apabila PRSE tersebut tidak terdaftar dalam program tersebut, maka mereka tidak bisa tercover oleh jaminan Kesehatan, sehingga tingkat kesejahteraan mereka akan terancam menurun. Oleh karena itu, praktikan akan menganalisis mengenai isu tersebut hingga pada bagaimana rencana intervensinya, sehingga diharapkan PRSE tersebut bisa tercover oleh Jaminan Kesehatan.

2.1.2 Tinjauan Konsep

a. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 1945 dan dalamnya menyatakan bahwa Pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negaranya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan “Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.

Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Sistem jaminan sosial nasional ini dilakukan berdasarkan dengan 3 asas yakni kemanusiaan (menjunjung tinggi harga diri manusia), manfaat (pemberian kebutuhan dasar hidup yang layak), serta keadilan (semua kalangan mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh jaminan sosial) dan berdasarkan 9 prinsip yaitu kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi setiap peserta program dan anggota keluarganya, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Pelaksanaan SJSN merupakan kewajiban negara, sekaligus kewajiban penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan mekanisme asuransi sosial dan kepesertaan yang bersifat wajib.

b. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh *out of pocket payment*, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial.

Jenis peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi 4, yaitu :

- 1) Peserta Bantuan Iuran (PBI), yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai Peserta PBI
- 2) Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) atau pekerja formal baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta

- 3) Peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap dikelompokkan sebagai peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)
- 4) Masyarakat Bukan Pekerja (BP)

Tiap-tiap jenis kepesertaannya memiliki jumlah iuran yang berbeda, yaitu Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai Peserta PBI, iurannya sebesar Rp. 42.000 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.

Selanjutnya bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) atau pekerja formal baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta, besaran iuran sebesar 5% dari upah, dengan rincian 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Untuk perhitungan iuran ini berlaku pula batas bawah yaitu upah minimum kabupaten/kota dan batas atas sebesar Rp 12 juta.

Terakhir bagi kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap dikelompokkan sebagai peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja). Untuk jenis kepesertaan ini, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai yang dikehendaki. Kelas 1 sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp. 100.000 per org per bulan dan kelas 3 sebesar Rp. 35.000 per org per bulan.

c. Kepesertaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan

PBI JK merupakan singkatan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Bantuan ini bukan merupakan bantuan uang tunai yang diserahkan langsung kepada masyarakat, melainkan berupa bantuan iuran kesehatan yang disalurkan melalui kemensos (Kementerian Sosial) dan dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan. Bantuan ini diberikan kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. PBI ini memiliki 2 jenis sumber dana, yaitu yang berasal dari APBN dan APBD, yang keduanya memiliki persyaratan kepesertaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepesertaan penerima PBI APBN
 - a) Terdaftar sebagai WNI.
 - b) NIK terdaftar di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil),.
 - c) Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - d) Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 2) Kepesertaan penerima PBI APBD
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Kabupaten Bandung (Asli Dilampirkan
 - b) Kartu Keluarga (Asli Dilampirkan)

- c) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Desa di Ketahui Kecamatan
- d) Foto Rumah (Tampak Depan, Ruang Tengah, Dapur dan Kamar Mandi)
- e) Surat Pernyataan Miskin berikut keterangan penghasilan
- f) Surat Keterangan (SUKET) Keperluan SKTM Rumah Sakit dari PUSKESOS Desa/Kelurahan

Alur kepesertaan peserta PBI APBN dan PBI APBD itu sendiri juga memiliki perbedaan. Adapun kriteria dari penerima PBI APBN itu sendiri Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diantaranya disebutkan bahwa:

- 1) Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- 2) Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.
- 3) Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.
- 4) Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Selain itu Adapun alur penerima PBI APBD berdasarkan Data Informasi Berbasis Database Sosial dan Kemiskinan (DIBEDASKEN), yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Alur penerimaan PBI APBD

d. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), merupakan masyarakat yang mengalami permasalahan, kesulitan hingga gangguan yang berakibat tidak dapat berfungsinya peran sosial di masyarakat serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara sosial maupun ekonomi. Hambatan, gangguan dan permasalahan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana (Fajarwati et al., 2017). Salah satunya ialah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), yang memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Wanita Rawan Sosial Ekonomi tergolong sebagai kaum rentan yang mengalami ketidaksetaraan.

Posisi seorang Perempuan rawan sosial ekonomi memegang peran sebagai kepala keluarga yang tidak hanya bertanggungjawab atas dirinya melainkan anggota keluarga atas kesejahteraan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, perempuan akan memegang peran ganda yang fungsinya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Berasal dari kelas menengah kebawah, perempuan rawan sosial ekonomi memiliki permasalahan yang dapat menghambat berjalannya kehidupan sosial ekonomi.

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran produktif dan reproduksi. Peran produktif ditunjukkan dengan keterlibatan perempuan dalam suatu pekerjaan yang menghasilkan sejumlah pendapatan, atau dengan kata lain perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga dengan mencari nafkah. Sedangkan peran reproduksi, perempuan memegang peranan secara biologis seperti hamil, melahirkan, menstruasi dan lain-lain. Peran-peran tersebut harus dijalankan secara bersamaan agar mampu mencapai segala kebutuhan dan kehidupan yang diimpikan. Beban berat yang ditanggung oleh PRSE dalam menjalankan peran gandanya sering kali berakibat pada tidak tersentuh keperluan individunya, sehingga dapat berakibat terganggunya kondisi Kesehatan fisik maupun mental.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi partisipasi perempuan salah satunya yaitu tekanan kondisi ekonomi dan peran ibu tunggal yang mengharuskan perempuan mencari nafkah dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga.

Meskipun adanya peningkatan angka partisipasi bekerja perempuan kondisi tempat bekerja, hingga upah belum mampu mengeluarkan perempuan miskin dalam permasalahan keterbatasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, hal ini dikarenakan perempuan menjadi satu-satunya tulang punggung utama keluarga.

2.1.3 Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah dan pengumpulan data, praktikan menggunakan metode wawancara pada saat melakukan home visit dan community involvement di masyarakat maupun kantor desa. Pihak yang diwawancarai, antara lain :

1) Masalah

- a) Pak Iyus selaku bidang Pelayanan Publik di Kantor Desa Soreang pada tanggal 9 Februari 2023
- b) Ibu Tuting selaku PSM di Desa Soreang pada tanggal 9 Februari dan tanggal 02 Maret 2022
- c) Ibu Iis, Ibu Iin, dan Ibu Irma selaku masyarakat yang masuk dalam golongan PRSE pada tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023

Dari wawancara tersebut, didapatkan beberapa masalah terkait PMKS, yaitu PRSE yang belum menjadi peserta program PBI JK, yaitu sebagai berikut :

- a) Para PPKS tersebut merasa tidak ada jaminan Kesehatan untuk dirinya. Mereka merasa takut apabila dalam kondisi sakit, karena mereka tidak memiliki biaya untuk memeriksakannya ke rumah sakit atau dokter. Bahkan untuk membeli obat Mereka lebih memilih untuk membeli obat warung dan tidak menggunakan obat yang berasal dari resep dokter.
- b) PRSE mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan mandiri karena terdesak oleh kondisi keluarga yang memerlukan pelayanan Kesehatan, namun ketika layanan tersebut sudah tidak diperlukan, mereka tidak mampu untuk membayarkan iuran di bulan-bulan berikutnya, sehingga mereka memiliki tunggakan di BPJS Kesehatan itu sendiri.
- c) Mayoritas PRSE belum mengurus SKTM ataupun PBI untuk meringankan biaya mereka apabila membutuhkan layanan rumah sakit. Sehingga mereka harus membayarkan biaya tersebut secara mandiri, yang tentunya akan memberatkan mereka.

2) Penyebab Masalah

Setiap masalah yang sudah dituliskan di atas, memiliki penyebabnya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

- a) Para PRSE takut memeriksakan kesehatannya di rumah sakit atau dokter, disebabkan oleh ketiadaan dana. Karena kita tau bahwa pendapatan dari PRSE itu tergolong minim dan bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja seperti pangan.
- b) Mereka yang mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan Mandiri, karena merasa terdesak dengan kondisi Kesehatan yang memang perlu segera mendapatkan pelayanan yang intensif. Hal tersebut dilakukan karena mereka belum menerima bantuan jaminan Kesehatan, yaitu PBI JK.
- c) Mayoritas PRSE di Desa Soreang belum mengurus SKTM dan kepesertaan PBI JK, hal tersebut disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama karena PRSE tersebut belum memperbarui syarat administrasi untuk mengurus SKTM ataupun PBI JK, seperti KK dan KTP, ada yang karena mereka perpindahan domisili dan ada juga yang mengalami perubahan status keluarga. Selain itu yang kedua, mereka justru tidak mengetahui mengenai program bantuan iuran jaminan Kesehatan itu. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Iis. Ketika ditanya mengenai kepesertaanya dalam program bantuan iuran jaminan Kesehatan, dia justru mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait program tersebut, sehingga dia tidak mengajukan diri untuk bantuan tersebut. Ke tiga, PRSE terkendala waktu untuk mengurus syarat administrasi tersebut, karena waktu mereka digunakan untuk bekerja.

3) Dampak Dari Masalah

Dari masalah dan penyebab yang sudah dijelaskan di atas, pasti memiliki dampak yang akan dirasakan oleh PRSE itu sendiri, berikut adalah dampak-dampaknya :

- a) Dari kondisi PRSE yang tidak menggunakan layanan Kesehatan karena terkendala dana, tentunya berdampak bagi kondisi Kesehatan dari PRSE itu sendiri, mereka tidak mendapatkan layanan Kesehatan yang optimal. Sedangkan kita tau bahwa PRSE rentan terkena masalah fisik dan mental.
- b) PRSE yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri karena terdesak, namun dibulan-bulan berikutnya mereka tidak bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu membayarkan iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut tentunya membuat mereka menjadi memiliki tunggakan dan Kembali lagi tida bisa mengakses layanan Kesehatan. Kondisi tersebut tentunya semakin mengancam kesejahteraan dari PRSE itu sendiri.

- c) Karena mereka belum mengurus berkas administrasi yang diperlukan sebagai syarat penerima bantuan iuran, maka mereka tidak bisa diajukan atau didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan itu sendiri. Selain itu, karena mereka tidak tau dan tidak paham akan program bantuan yang ada, maka mereka tidak mengajukan dan mengurus berkasnya.

4) Fokus Masalah

Dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan di atas, praktikan menyimpulkan bahwa masalah utama yang menjadi penyebab tidak tercovernya PRSE oleh jaminan Kesehatan adalah karena PRSE yang belum menjadi penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan. Sehingga mereka tidak bisa mengakses Kesehatan secara optimal, dan mereka justru mengambil Langkah menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang justru membuat mereka memiliki tunggakan iuran. Oleh karena itu fokus masalah yang akan dikaji oleh praktikan, yaitu mengenai kepesertaan PRSE dalam penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan yang masih sangat rendah.

Agar lebih mudah memahami mengenai fokus masalah yang akan dikaji, praktikan mengilustrasikannya dengan alat bantu masalah, yaitu pohon masalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab-penyebab yang menjadi faktor terjadinya permasalahan, yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam bagian daun. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab, fokus masalah, dan dampak dari masalah tersebut:

Penjelasan :

Karena PRSE itu sendiri belum memperbarui berkas administrasi yang menjadi syarat pendaftaran peserta PBI JK baik karena terkendala waktu atau mereka yang belum mengetahui mengenai program bantuan itu sendiri, sehingga memunculkan fokus masalah berupa kepesertaan PRSE dalam penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan yang masih sangat rendah. Dengan Berkas administrasi yang belum diperbarui itu, menyebabkan PRSE tidak bisa mengurus pendaftaran menjadi peserta PBI JK.

Dengan kondisi tersebut, maka PRSE belum tercover jaminan Kesehatan. Sehingga mereka tidak bisa mengakses layanan Kesehatan secara optimal.

Karena belum tercover PBI JK, maka PRSE harus membiayai layanan kesehatannya secara mandiri. Hal tersebut juga membuat PRSE menjadi takut untuk memeriksakan kesehatannya di instansi Kesehatan karena ketiadaan biaya. Sehingga ketika sudah terdesak, atau dalam kondisi mereka memerlukan layanan Kesehatan secara intens, namun mereka belum mendapatkan bantuan iuran, yang mereka lakukan adalah mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, sehingga memiliki tanggung jawab dalam pembayaran iuran tiap bulannya. Karena mendaftar karena terdesak saja, tanpa memperhitungkan tanggungan yang ada, mereka menjadi tidak bisa membayarkan iuran BPJS Kesehatan di bulan-bulan berikutnya. Mereka menjadi memiliki tunggakan dalam iuran BPJS Kesehatan dan Kembali tidak bisa mengakses layanan Kesehatan public. Hal tersebut tentunya akan mengancam tingkat kesejahteraan dari PRSE itu sendiri.

b. Identifikasi Kebutuhan

Dengan melihat masalah yang dikaji melalui pohon masalah, masyarakat yang masuk dalam kategori PRSE di Desa Soreang yang belum menjadi peserta PBI JK, yaitu penyebab utamanya adalah mereka tidak terdaftar dalam PBI-JK.

Serta penyebab lainnya, yaitu kurangnya pengetahuan PRSE tentang mekanisme PBI-JK dan sebagian PRSE belum terdaftar di DTKS.

Maka diperlukan pendampingan kepada PRSE di Desa Soreang untuk segera memproses pengajuan PBI-JK agar mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan yang optimal, layak, adil, dan tidak mengancam kondisi kesejahteraan mereka.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

1) Potensi

Potensi yang membantu proses pemecahan masalah, yaitu antara lain :

- a) Masyarakat yang kooperatif
- b) Kordinasi antar tingkat dalam pemerintahan Desa Soreang yang cukup baik.
- c) Kualitas fasilitator dan kaderisasi yang cukup baik.
- d) PSM yang sangat aktif

2) Sistem Sumber

Sistem sumber kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai sumber dan potensi yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial.

Selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Berikut adalah sistem sumber kesejahteraan sosial yang dapat digunakan untuk membantu menangani permasalahan yang ada :

a) Sistem sumber informal

Sistem sumber informal atau alamiah merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya. Sumber ini diharapkan dapat membantu memperoleh akses kepada sistem sumber lainnya dalam bentuk pemberian informasi dan mempermudah birokrasi. Sumber ini dalam penggunaannya tidak menggunakan prosedur, sifatnya tanpa pamrih, ikhlas, jujur, penuh persahabatan, cinta kasih, dan tidak ada latar belakang yang tidak baik. Bentuknya berupa keluarga, kerabat, tetangga, ataupun orang lain yang dapat membantu PRSE dalam mempermudah akses dalam pendaftaran PBI JK.

b) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal adalah keanggotannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya.

Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Bentuk sistem sumber yang dapat dimanfaatkan adalah pemerintahan Desa Soreang

c) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber (lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta) yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum.

Dalam hal ini sistem sumber yang dapat digunakan adalah BPJS Kesehatan, PSM, Puskesmas, kader posyandu, dan forum RW yang ada di Desa Soreang,

Dari potensi serta sistem sumber yang ada, praktikan berharap besar, bahwa masalah mengenai Kepesertaan PRSE dalam penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan yang masih sangat rendah dapat ditangani.

2.1.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini, dimana salah satu penunjang pembangunan Negara adalah adanya masyarakat yang sehat.

Aturan dan Undang-undang Kesehatan merupakan suatu produk hukum, yang lahir dari realita permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat, khususnya masyarakat rentan yang ingin mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik, bermutu dan antidiskriminasi. PRSE merupakan salah satu jenis masyarakat yang tergolong rentan yang mengalami ketidaksetaraan.

Posisi seorang Perempuan rawan sosial ekonomi memegang peran sebagai kepala keluarga yang tidak hanya bertanggungjawab atas dirinya melainkan anggota keluarga atas kesejahteraan keluarganya. Peran ganda tersebut yang membuat PRSE memiliki kondisi fisik dan mental yang rentan.

Sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membentuk suatu sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang ditempuh adalah dengan menggalakan program JKN yang dikelola oleh BPJS.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC). *Universal Health Coverage* merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *UHC* mengandung dua elemen inti yakni.

- 1) Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan
- 2) Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Definisi UHC diatas merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan yaitu:

- 1) Kesamaan akses pelayanan kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja;
- 2) Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan;
- 3) Memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian keuangan/ finansial.

Namun, kondisi dilapangan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan praktikan dengan beberapa pihak, masih ada masyarakat rentan khususnya PRSE di Desa Soreang yang belum tercover jaminan Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain PRSE itu sendiri belum mengurus berkas administrasi yang menjadi syarat pengajuan ke bantuan iuran jaminan Kesehatan. Baik karena terkendala waktu atau bahkan masyarakat itu sendiri belum mengetahui mengenai program bantuan iuran jaminan Kesehatan yang ada. Sehingga mereka tidak mengurus berkas untuk pengajuan bantuan iuran tersebut.

Kondisi tersebut harus segera diberi arahan dan pendampingan, agar PRSE yang rentan akan ancaman Kesehatan baik fisik maupun mental bisa tercover atau terjamin oleh program jamina Kesehatan itu sendiri. Pendampingan yang dimaksud adalah pemfasilitasan PRSE dalam pembaruan atau pengurusan berkas administrasi, yang nantinya bisa diajukan ke program PBI JK atau untuk bantuan iuran lainnya.

b. Tujuan Umum dan khusus

Adapun tujuan umum dari rencana intervensi ini adalah Pemerataan PBI-JK bagi kelompok rentan, yaitu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi(PRSE)

Adapun tujuan khusus dari rencana intervensi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan partisipasi kelompok rentan, yaitu PRSE dalam JKN melalui program PBI-JK
- 2) Pengoptimalan layanan Kesehatan bagi kelompok rentan, yaitu PRSE

- 3) Mengantisipasi ancaman kondisi sosial ekonomi yang memburuk akibat dari resiko kesehatan
- 4) Meningkatkan kesadaran kelompok rentan khususnya PRSE mengenai pentingnya jaminan Kesehatan bagi kondisi kesejahteraannya
- 5) Meningkatkan pemahaman kelompok rentan, yaitu PRSE mengenai program bantuan iuran jaminan Kesehatan
- 6) Mengupayakan hak dari kelompok rentan, yaitu PRSE untuk mendapatkan jaminan kesehatan
- 7) Perbaruan dan pengajuan data untuk PRSE menjadi calon penerima bantuan iuran jaminan kesehatan

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program ini yaitu “Sosialisasi dan Pendampingan PRSE dalam pengajuan haknya mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan”.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk edukasi kepada peserta BPJS Kesehatan Mandiri dan fasilitasi pendaftaran program bantuan iuran JK. Untuk sarannya yaitu 10 PRSE di Desa Soreang. Berikut adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini :

Tabel 2.2 Bentuk Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana Kegiatan
1	Penyuluhan dan diskusi tentang jaminan sosial	Masyarakat paham tentang jaminan sosial dan urgensinya	Dinas sosial Kabupaten Bandung
2	Penyuluhan dan diskusi tentang PBI-JK atau bantuan iuran jaminan Kesehatan lainnya	Masyarakat paham mengenai konsep PBI-JK dan bantuan iuran lainnya	Pengurus Desa, PSM, dan Praktikan selaku Pekerja Sosial
3	Pendampingan dan fasilitasi pengajuan pendaftaran PBI-JK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mau memperbarui berkas administrasi untuk keperluan pendaftaran 2. Masyarakat memperoleh haknya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam JKN melalui PBI. 	Praktikan, PSM, fasilitator, dan tiap tiap ketua RT

d. Sistem partisipan

Berikut adalah orang-orang yang akan berpartisipasi dalam program kegiatan ini :

Tabel 2.3 Sistem partisipan

Sistem	Definisi	Sistem Partisipasi
Initiator	Orang yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah kepesertaan PRSE dalam PBI-JK	PSM dan fasilitator Desa Soreang
Agent of change	Pekerja Sosial profesional, lembaga, atau yang lainnya, yang mengkoordinasikan usaha perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial (Praktikan), BPJS Kesehatan cabang Soreang, Pemerintah Desa, dan Lembaga terkait
Client	Penerima manfaat primer dan sekunder	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang belum mendapat PBI-JK
Support	Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan dalam pemecahan masalah.	BPJS Kesehatan cabang Soreang, Pemerintahan Desa, dan Lembaga terkait
Controlling	Orang atau orang2 yang mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	Kepala desa dan ketua RW/RT
Host	Bagian dari organisasi atau masyarakat yang memberikan naungan secara administrasi dalam intervensi	PSM dan Tiap-tiap ketua RT

Implementing	Staf atau voluntir yang melaksanakan intervensi	Pekerja sosial dan seorang inisiator
Target	Pihak-pihak yang harus dirubah agar intervensi dapat berhasil.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang belum mendapat PBI-JK
Action	Orang yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yg bertanggung jawab mengawal upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas.	Inisiator, agen perubahan, dan voluntir.

Sumber : *Praktikan Tahun 2023*

e. Metode dan Teknik

1) Metode *Community Organization Community Development* (COCD)

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958). *Community Work* adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Alan Tvevetrees, 1993).

Masyarakat dalam konteks pengembangan dan pengorganisasian, diartikan sebagai sebuah ‘tempat bersama’ yakni sebuah wilayah geografi yang sama (Mayo, 1998), dalam hal ini, yaitu Desa Soreang.

2) Teknik Penyuluhan dan Fasilitasi

a) Penyuluhan

Penyuluhan, yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarkan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya.

Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

b) Fasilitasi

Fasilitasi merupakan teknik untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitatornya merupakan pekerja sosial atau praktikan.

f. Rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.4 RAB

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Administrasi				
	Proposal pengajuan	50	Lembar	500	25.000
	Surat Undangan	50	Lembar	500	25.000
	Pamflet Materi	15	Lembar	1.000	15.000
Jumlah 1					65.000
2	Logistik				
	Spanduk 4x2	1	Buah	100.000	100.000
Jumlah 2					100.000
3	Honorarium Narasumber Kegiatan Penyuluhan				
	Dinas Sosial Kabupaten Bandung	1	Orang	1.000.000	1.000.000
Jumlah 3					1.000.000
4	Konsumsi				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	Snack Peserta	10	Orang	10.000	100.000
	Snack TKM	20	Orang	10.000	200.000
	Snack Perwakilan Pemerintah Desa	5	Orang	10.000	50.000
	Makan Siang Narasumber	2	Orang	20.000	40.000
	Makan siang peserta	10	Orang	20.000	200.000
	Makan Panitia	20	Orang	20.000	400.000
	Makan Perwakilan	5	Orang	20.000	100.000

	Desa				
	Air Mineral	5	Dus	15.000	75.000
Jumlah 4					1.275.000
Jumlah Keseluruhan : 2.440.000					

Sumber : Praktikan Tahun 2023

Adapun alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan program, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5 Alat yang diperlukan

No	Alat	Jumlah	Satuan
1	Sound System	1	Buah
2	Michrophone	2	Buah
3	Proyektor	1	Buah
4	Laptop	2	Buah
5	Kabel Roll	3	Buah
6	Banner	1	Buah
7	Meja	4	Buah
8	Kursi	100	Buah
9	Taplak Meja	4	Buah

Sumber : Praktikan Tahun 2023

g. Analisi kelayakan program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman di dalam program “Sosialisasi dan Pendampingan PRSE dalam pengajuan haknya mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan”

Uji Kelayakan Program

Tabel 2.6 Uji Kelayakan Program

INTERNAL	Strength	Weakness
<div style="position: relative; height: 100px;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya antusiasme masyarakat ketika ada program baru yang akan dilaksanakan • Masyarakat memiliki kemauan untuk melakukan perubahan • Masyarakat merasa butuh akan program ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan masyarakat
EKSTERNAL	Strategi SO	Strategi WO
<p style="text-align: center;">Opportunity</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari Pemerintah Desa Soreang • Desa soreang memiliki koordinasi yang baik antarlembaganya. • Memiliki banyak sistem sumber yang bisa digunakan khususnya sistem sumber kemasyarakatan 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak demi berjalannya kegiatan program. 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengetahuan mengenai PBI-JK • Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pengajuan peserta PBI-JK
Threats	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Ini merupakan kegiatan sosialisasi pertama yang dilakukan secara komunitas, sehingga berpotensi terjadinya <i>trial and error</i> 	<p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait • Melakukan Kerjasama dengan masyarakat dan mempersiapkan kegiatan dengan matang. 	<p style="text-align: center;">Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim kerja dan pekerja sosial melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pengajuan kepesertaan PBI-JK

Sumber : Praktikan Tahun 2023

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Program Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Kesehatan layak untuk dijalankan, karena Strength (S) lebih besar daripada Weakness (W) dan Opportunity (O) lebih besar daripada Threats (T).

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistematis dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan.

Tabel 3.7 Langkah Kegiatan

Langkah Kegiatan	Februari		Maret		
	Minggu Ke				
	3	4	1	2	3
1. Persiapan					
Membentuk Tim Kerja Masyarakat					
Melakukan rapat mengenai kegiatan dan jadwal kegiatan					
Membuat proposal kegiatan dan undangan					
Mengurus perizinan dan menyebarkan undangan					
Menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan					
2. Pelaksanaan Sosialisasi					
Sambutan dari perwakilan desa					
Penyuluhan dan diskusi tentang jaminan sosial dan urgensinya untuk masyarakat khususnya kelompok rentan					
Penyuluhan dan diskusi tentang Konsep PBI-JK					
3. Pendataan					
Pendataan mengenai berkas yang harus diperbarui atau dipersiapkan dari tiap-tiap PRSE					
4. Pendampingan dan fasilitasi					
Fasilitasi dalam pengurusan berkas administrasi					
Pendampingan dalam pengajuan kepesertaan PBI-JK					
5. Pengakhiran					
Evaluasi dan monitoring					
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban					
Pembubaran TKM					

Kegiatan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

1) **Persiapan**

a) Membentuk Tim Kerja Masyarakat

TKM program Sosialisasi dan Pendampingan PRSE dalam pengajuan haknya mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan, terdiri dari praktikan selaku Pekerja Sosial, Ketua RT yang terdapat PRSE, PSM, perwakilan PUSKESOS, Perwakilan kader dari tiap RW, dan perwakilan dari Pemuda Karang Taruna, yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

b) Melakukan Rapat

Rapat dilakukan untuk membahas mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja. Rapat ini diadakan di kantor desa. Adapun dalam rapat ini akan membahas terkait dengan siapa saja yang akan mengisi acara dan bagaimana agenda kegiatan, serta hal lain yang termasuk dalam konsep kegiatan.

c) Membuat proposal kegiatan dan undangan

Sekretaris dalam kepanitiaan akan diminta untuk membuat proposal sebagai bentuk perizinan program serta undangan untuk Perwakilan desa, narasumber, dan masyarakat yang menjadi sasaran program.

d) Perizinan dan menyebarkan undangan

Praktikan dan humas akan mengunjungi kantor desa dengan tujuan melakukan perizinan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu setelah itu akan menyebarkan undangan ke tiap RW dan RT yang menjadi sasaran, dan nantinya RT akan menyebarkan undangan tersebut ke PRSE.

e) Menyiapkan alat

Para pemuda karang taruna akan mengambil peran dalam kegiatan ini, di mana para pemuda tersebut yang akan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan program.

2) **Pelaksanaan**

a) Pelaksanaan Sosialisasi

Rundown pelaksanaan kegiatan yang berisi agenda pelaksanaan program terlampir.

b) Pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi

Setelah kegiatan sosialisasi, TKM akan memuali melakukan pendataan mengenai berkas apa saja yang harus diurus, hingga nantinya akan difasilitasi ntuk pengurusannya. Lalu pendampingan dalam pengajuan kepesertaan PBI-JK.

3) Pengakhiran

a) Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam program ini dilakukan dengan pembuatan angket yang disebarakan kepada ex partisipan program beberapa hari setelah program dilaksanakan. Pembagian kuesioner dilakukan oleh humas, sama seperti pada saat membagikan surat undangan

b) Pembuatan LPJ

Setelah kegiatan evaluasi selesai, selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada desa. Setelah semua tugas dan kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya, maka panitia dibubarkan.

2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

2.2.1 Gambaran Masalah

Menurut Permensos No.1 Tahun 2019, bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan klasifikasi seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin atau bisa disebut fakir miskin menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.

- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Program-program bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah sudah banyak diimplementasikan, seperti yang kita tau bahwa ada beberapa program bantuan sosial, yaitu PKH, BPNT, BLT, Bantuan Usaha, RASTRA, bantuan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Namun, dalam kenyataannya, program tersebut masih memiliki beberapa masalah dan kendala. Seperti masih banyak fakir miskin yang tidak tercover bantuan sosial pemerintah, ketidak tepat sasaran penerima bantuan sosial, penggunaan dana bantuan sosial yang kurang tepat oleh KPM, dan lain sebagainya.

Di Desa Soreang sendiri, terdapat sejumlah keluarga prasejahtera dan Fakir Miskin). Namun, tidak semua dari mereka telah tercover oleh bantuan sosial dari pemerintah. Hal tersebut tentunya memiliki berbagai dampak, dari kondisi kesejahteraan fakir miskin itu sendiri yang semakin beragam, berpotensi pada tindakan kriminalitas karena kondisi fakir miskin yang tidak bisa mencukupi *basic needs*, hingga terjadinya kecumburuan sosial dalam masyarakat yang dapat berpotensi pada konflik sosial.

Melihat kondisi tersebut, para pemuda di Desa Soreang yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna bekerja sama dengan pihak Desa, Rw/Rt, dan juga para kader membentuk suatu program bantuan sosial kemasyarakatan, yang sasarannya adalah masyarakat fakir miskin yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Program ini merupakan program bantuan sosial yang pendanaannya menggunakan dana hibah . Dana tersebut diperoleh dari dana hibah masyarakat, instansi sosial dan kesehatan serta industri konveksi kepada organisasi kemasyarakatan, yaitu Karang Taruna. Kegiatan Penggalangan Uang dan Barang dari Hibah tersebut dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs*) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat. Dari hasil wawancara dengan ketua Karang Taruna bahwa sistematika dari program bantuan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Karang Taruna mengkoordinir siapa saja yang akan menjadi donatur program
- b. Setelah itu dana dari para donatur tersebut disatukan dalam 1 rekening untuk nantinya diserahkan pada tiap-tiap keluarga yang menjadi sasaran

- c. Di satu sisi Karang taruna bersama RT dan kader mendata jumlah keluarga yang membutuhkan, namun belum tercover oleh bantuan sosial dari pemerintah
- d. Setelah didata, dilakukan verifikasi dan validitas data, untuk membuktikan apakah individu atau keluarga tersebut merupakan golongan fakir miskin.
- e. Setelah dilakukan verifikasi data, selanjutnya dana dari para donatur tersebut, diberikan kepada individu atau keluarga yang menjadi sasaran baik berupa tunai maupun non-tunai sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah yang sama rata.

Hasil observasi dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial kemasyarakatan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun dilihat dari mekanismenya bahwa dalam penyelenggaraan PUB dan penyaluran dana hibah di atas masih terdapat kekurangan-kekurang khususnya dalam prosedur kerja yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan syarat dan Ketentuan Umum dari Penggalangan Uang dan Barang (PUB) dan penyaluran dana hibah untuk bantuan sosial.

Sehingga timbulah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Desa Soreang.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal tersebut dikarenakan oleh belum optimalnya sosialisasi mengenai Kebijakan PUB dan Penyaluran dana hibah untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan. Di satu sisi kemampuan SDM sebagai penyelenggara kegiatan juga masih rendah dalam pengimplementasian kebijakan tentang PUB dan penyaluran dana hibah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pembuatan tim kerja atau pengorganisasian yang kurang jelas, sedangkan Proses implementasi kebijakan PUB dan Penyalurannya, diperlukan sebuah pengorganisasian berupa struktur dan tugas oraganisasi yang jelas. Lalu ada juga persepsi dari agen pelaksana yang memandang kegiatan PUB dan penyaluran hibah ini hanya kegiatan penggalangan dana biasa, jadi tidak memerlukan ketentuan-ketentuan dalam Pengumpulan dan penyalurannya. Hal ini yang membuat praktikan tertarik untuk melakukan Implementasi Kebijakan PUB dan Penyaluran dana hibah untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di Desa Soreang melalui sosialisasi serta pendampingan kepada organisasi kemasyarakat yang menjadi penggerak program.

2.2.2 Tinjauan Konsep

a. Konsep Dana Bantuan Sosial

1) Pengertian Dana Bantuan Sosial

Menurut Permensos No 1 Tahun 2019 , Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa barang, uang, jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu, atau kelompok yang rentan terhadap risiko sosial.

2) Tujuan Dana Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan sosial pada Kementrian/Lembaga. Pada pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwasanya tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a) Rehabilitasi sosial, bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- b) Perlindungan sosial, untuk mencegah dan menanani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal
- c) Pemberdayaan sosial, semua upaya yang dilakukan diarahkan untuk memberikan daya kepada seseorang, kelompok atau masyarakat sehingga dapat berdaya dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- d) Jaminan sosial, sebuah program atau skema untuk menjamin seluruh elemen masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- e) Penanggulangan Kemiskinan, sebagai suatu kebijakan ataupun program untuk seseorang, kelompok atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

Penanggulangan bencana, sebagai suatu upaya dalam membuat kebijakan untuk menanggulangi risiko terhadap seseorang, kelompok atau masyarakat yang rentan terhadap permasalahan sosial.

3) Sumber Dana Bantuan Sosial

a) Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN)

Sumber dana bantuan sosial yang paling utama yaitu berasal dari APBN yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat masyarakat miskin dan rentan oleh kementerian keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp332 triliun sampai Rp349 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif

b) Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD)

Dana bantuan sosial dari pihak swasta biasanya disalurkan melalui program CSR Perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya dana bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

c) Dana Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terns menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Konsep Penggalangan Uang dan Barang (PUB)

1) Pengertian PUB

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Penggalangan Uang dan Barang, dijelaskan bahwa yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

2) Tujuan PUB

- a) Terhimpunnya uang atau barang dari masyarakat untuk penanganan usaha kesejahteraan sosial.
- b) Tersalurkannya uang atau barang dari hasil pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c) Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- d) Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- e) Terselenggaranya pengumpulan sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Cara dan Jenis Penyelenggaraan PUB

- a) Mengadakan pertunjukan;
- b) mengadakan bazar;
- c) penjualan barang secara lelang;
- d) penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e) penjualan perangko amal;
- f) pengedaran daftar derma;
- g) penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h) penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i) permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j) layanan pesan singkat donasi;
- k) pembulatan sisa nilai pembelian konsumen;
- l) layanan melalui rekening bank;
- m) layanan dalam jaringan;
- n) aplikasi digital;
- o) layanan uang elektronik; dan
- p) Media sosial.

4) Kebijakan tentang Ketentuan dan Syarat PUB

a) Yang berhak menyelenggarakan PUB

Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau oleh Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

b) Syarat organisasi yang menyelenggarakan

Mempunyai Akta Notaris atau Akta Pendirian dengan disertai AD dan ART yang memuat:

- Azas, sifat, dan tujuan organisasi
- Lingkup kegiatan
- Susunan organisasi
- Sumber keuangan
- Apabila bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, Organisasi harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat.
- SK Kepanitiaan bagi pemohon.

c) Prosedur Pengajuan Ijin Penyelenggaraan PUB

Penyelenggaraan PUB harus memiliki izin dari pejabat terkait, yaitu :

a) Menteri Sosial

Untuk penyelenggaraan yang meliputi:

- Seluruh Indonesia
- Melebihi wilayah satu provinsi
- Satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain

Syarat pengajuan ijin meliputi :

- Surat persetujuan rekomendasi dari Gubernur tempat dimana organisasi pemohon berkedudukan.
- Pemohon yang berkedudukan di Provinsi lain disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam point di atas harus disertai pula persetujuan Gubernur tempat pengumpulan sumbangan social akan diselenggarakan.
- Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi dimana tempat organisasi pemohon berkedudukan.

b) Gubernur

Untuk penyelenggaraan yang meliputi:

- Seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan
- Melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota

Persyaratan permohonan ijin meliputi :

- Surat persetujuan rekomendasi dari Bupati/Walikota tempat dimana organisasi pemohon berkedudukan.
- Rekomendasi dari Dinas/Badan/Kantor Sosial Kabupaten/Kota dimana tempat pemohon berkedudukan.

c) Bupati/Walikota

Untuk penyelenggaraan yang meliputi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Persyaratan permohonan ijin meliputi :

Rekomendasi dari Dinas/Badan/Kantor Sosial Kabupaten/Kota dimana tempat pemohon berkedudukan.

d) Bupati, Kepala Daerah

Dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi ijin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut

5) Persyaratan kepada Pengaju Ijin PUB

Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat diselenggarakan oleh organisasi atau oleh Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang memberi ijin. Setiap organisasi yang akan melaksanakan usaha pengumpulan sumbangan harus mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga yang memuat :

- a) Azas, sifat dan tujuan organisasi
- b) Lingkup kegiatan
- c) Susunan organisasi
- d) Sumber-sumber keuangan
- e) Sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pd instansi sosial setempat.
- f) Talah melaksanakan kegiatan Bidang Usaha kesejahteraan Sosial minimal 1 tahun.
- g) Mempunyai kepanitiaan yg meliputi : susunan pengurus kepanitiaan, alamat dan program kepanitiaan.

6) Kewajiban Penyelenggara PUB

- a) Penyelenggara dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan wajib melapor kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.
- b) Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam surat rekomendasi.
- c) Menyampaikan laporan kepada Pejabat terkait dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung

7) Ketentuan Penyaluran Hasil PUB

- a) Hasil PUB berbentuk uang disalurkan dengan ketentuan:
 - Untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - Untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
 - Penyaluran pub dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.
- b) Hasil PUB berbentuk barang disalurkan dengan ketentuan:
 - Untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - Untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

c. Konsep Karang Taruna sebagai PSKS

1) Pengertian PSKS

Potensi Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat di dayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

Sumber Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang telah memiliki kemampuan dan atau telah memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan social.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan social.

2) Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b) Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c) Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d) Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

3) Tujuan Karang Taruna

- a) Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b) kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c) pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d) pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

4) Fungsi Karang Taruna

- a) Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b) menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c) meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d) menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e) menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3 Asesmen

a. Identifikasi Masalah

1) Masalah

Dalam identifikasi masalah dan pengumpulan data, praktikan menggunakan metode wawancara pada saat melakukan *Home Visit* dan *Community Involvement* di masyarakat maupun kantor desa. Pihak yang diwawancarai, antara lain :

- a) Pak Iyus selaku bidang Pelayanan Publik di Kantor Desa Soreang pada tanggal 23 Februari 2023
- b) Pak Rohman selaku bidang Kesejahteraan Sosial di Kantor Desa Soreang pada tanggal 23 Februari 2023
- c) Pak Ganjar selaku ketua Karang Taruna di Desa Soreang pada 3 Maret 2023

Dari wawancara tersebut, didapatkan beberapa masalah terkait PUB untuk bantuan sosial kemasyarakatan serta penyalurannya, sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan PUB dan Penyalurannya tidak didasari dengan perencanaan yang jelas dan matang, hal tersebut tentu sangat bermasalah bagi proses penyelenggaraan program.
- b) Struktur organisasi dan Kepengurusan penyelenggaraan PUB di Desa Soreang masih belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas.

Dari hasil wawancara bahwa terdapat masalah dalam pengelola atau penyelenggara PUB itu sendiri, di mana pembagian tugasnya belum tertulis dengan jelas sehingga masih terjadi tumpang tindih tugas, fungsi, dan wewenang.

- c) Tidak adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas, sehingga program tersebut dinilai kurang transparansi. Selain itu juga dalam penyelenggaraan PUB dan Penyalurannya tidak ada pelaporan terkait bukti pemanfaatan dana dan juga pencapaian tujuan.

2) Penyebab Masalah

Masalah-masalah yang terjadi terkait penyelenggaraan PUB dan Penyaluran dana bantuan sosial masyarakat di Desa Soreang disebabkan oleh penyelenggara PUB, yaitu organisasi kemasyarakatan berupa Karang Taruna di Desa Soreang, belum mengetahui terkait ketentuan dan syarat dari penyelenggaraan PUB itu sendiri. Hal tersebut juga menimbulkan penyebab turunan, yaitu karena penyelenggara belum tau bahwa terdapat standar ketentuan dan syarat penyelenggaraan PUB dan penyalurannya, maka memunculkan persepsi bahwa pengumpulan dana hibah ini merupakan kegiatan sumbangan biasa yang tidak perlu mengikuti ketentuan dan syarat yang ada. Lalu hal itu juga akhirnya membuat proses penyelenggaraan PUB dan penyalurannya tidak sesuai dengan standar ketentuan dan syarat yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU No.9 Tahun 1961. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan ketua karang taruna, bahwa memang benar penyelenggaraan PUB ini belum mengikuti standar aturan yang berlaku, dikarenakan ketidaktahuan penyelenggara.

3) Dampak Dari Masalah

Masalah yang ditimbulkan dari penyebab-penyebab di atas, tentunya memiliki dampak bagi penyelenggaraan bantuan sosial masyarakat Di Desa Soreang itu sendiri, di mana ketika penyelenggaraan PUB dan penyalurannya belum sesuai dengan peraturan dan syarat yang berlaku, maka akan berdampak pada kurang optimalnya penyaluran program. Selain itu, dampak lainnya adalah timbul asumsi negatif publik terkait penyelenggaraan PUB itu sendiri, karena dirasa kurang transparan dan tidak memiliki bukti laporan dan pertanggung jawaban pemanfaatan dana bantuan sosial, maka hal tersebut dapat memberi peluang bagi tindak korupsi atau penyelewengan dana.

4) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil wawancara terkait masalah, penyebab, dan dampak yang terjadi terkait penyelenggaraan PUB dan penyalurannya.

Praktikan menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena penyelenggaraan PUB belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah-masalah lain yang cukup berdampak bagi penyelenggara itu sendiri.

Agar lebih mudah memahami mengenai fokus masalah yang akan dikaji, praktikan mengilustrasikannya dengan alat bantu masalah, yaitu pohon masalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab-penyebab yang menjadi faktor terjadinya permasalahan, yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam bagian daun. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab, fokus masalah, dan dampak dari masalah tersebut.

Penjelasan :

Berangkat dari tidak adanya sosialisasi terkait peraturan dan sistematika penyelenggaraan PUB yang sesuai dengan UU kepada PSKS, dalam hal ini adalah Karang Taruna sebagai penyelenggara PUB, sehingga Karang Taruna tersebut menjadi tidak tau bahwa dalam penyelenggaraan PUB memiliki aturan dan syarat yang harus diikut.

Maka, mereka menganggap bahwa PUB yang mereka lakukan itu hanya penggalangan dana biasa tanpa harus terikat dengan ketentuan ataupun syarat yang ada.

Hal tersebut menimbulkan suatu masalah yang akhirnya menjadi fokus masalah dalam kegiatan praktikum Analisis Dana Bantuan Sosial kali ini, yaitu penyelenggaraan PUB dan Penyalurannya yang tidak sesuai atau tidak mengikuti skema, ketentuan, dan syarat yang berlaku, baik dari ketentuan dan syarat perijinan, pengorganisasian, perencanaan kegiatan maupun perencanaan anggaran, pelaporan, dan bukti tanggung jawab pemanfaatan dana untuk bantuan sosial, serta pengawasan, tidak sesuai bahkan tidak dilakukan dalam penyelenggaraan PUB dan Penyaluran dana tersebut.

Masalah tersebut tentunya memiliki dampak yang berpengaruh untuk penyelenggaraan bantuan sosial kemasyarakatan itu sendiri, maupun Karang Taruna sebagai penyelenggara, seperti tidak adanya transparansi dari penyelenggaraan PUB dan penyalurannya, sehingga dapat memberikan peluang terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana. Selain itu, bisa menimbulkan asumsi-asumsi negatif dari publik terkait pemanfaatan dana yang telah dikumpulkan dan penyalurannya. Hal tersebut tentunya berdampak bagi kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan itu sendiri yang menjadi kurang optimal. Meskipun tujuan dari bantuan sosial sudah terlaksana, namun pengimplementasi kebijakan atau peraturan tentang penyelenggaraan PUB dan penyaluran dana untuk bantuan sosial kemasyarakatan itu sangat diperlukan demi terhindar dari permasalahan-permasalahan terkait penggalangan dana.

b. Identifikasi Kebutuhan

Melihat dari fokus masalah mengenai penyelenggaraan PBU dan penyaluran dana untuk bantuan sosial kemasyarakatan yang belum sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, yang penyebab utamanya adalah belum adanya sosialisasi terkait peraturan ketentuan dan syarat penyelenggaraan PBU dan penyaluran dananya, sehingga penyelenggara tidak mengetahui akan hal itu.

Maka dalam hal ini organisasi Karang Taruna membutuhkan sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUB itu sendiri, baik mekanisme, prosedur, ketentuan-ketentuan, hingga pada persyaratan yang harus diikuti dan ditaati. Sehingga diharapkan untuk penyelenggaraan PBU selanjutnya sudah bisa sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

1) Sistem sumber informal

Bentuk dari sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu dukungan dan pemberian motivasi oleh rekan organisasi di Karang Taruna, sehingga bisa memiliki dorongan untuk melakukan perubahan.

2) Sistem sumber formal

Bentuk dari sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu kelompok sesama anggota Karang Taruna itu sendiri dan pemerintahan Desa Soreang.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini, yaitu para PSKS yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial seperti dinas sosial Kabupaten Bandung, Pekerja Sosial Masyarakat, dan para Fasilitator Desa Soreang.

2.2.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraannya, bantuan sosial memiliki beberapa sumber anggaran dana, salah satunya adalah dana hibah, baik hibah dari pemerintah kepada pemerintah lain, maupun hibah dari masyarakat untuk organisasi yang termasuk dalam PSKS yang memiliki peruntukan dalam aktivitas pembangunan kesejahteraan sosial. Anggaran dari dana hibah masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Penggalangan Uang dan Barang (PUB), di mana PBU tersebut memiliki cara yang beragam.

Di Desa Soreang sendiri, terdapat suatu program bantuan sosial kemasyarakatan, yang anggaran dananya berasal dari dana hibah masyarakat, instansi kesehatan dan sosial, serta dari industri dalam bentuk CSR. Dalam penyelenggaraannya, menggunakan cara PUB berupa permintaan kepada masyarakat secara tulis dan lisan. Hasil observasi menggambarkan bahwa program bantuan sosial kemasyarakatan memang sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs*).

Namun, dilihat dari mekanismenya, bahwa dalam penyelenggaraan PUB dan penyaluran dana hibah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan khususnya dalam prosedur kerja yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan syarat dan Ketentuan Umum dari Penggalangan Uang dan Barang (PUB) dan penyaluran dana hibah untuk bantuan sosial.

Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi terkait peraturan dan sistematisa penyelenggaraan PUB yang sesuai dengan UU kepada PSKS, dalam hal ini adalah Karang Taruna sebagai penyelenggara PUB, sehingga Karang Taruna tersebut menjadi tidak tau bahwa dalam penyelenggaraan PUB memiliki aturan dan syarat yang harus diikuti. Maka, mereka menganggap bahwa PUB yang mereka lakukan itu hanya penggalangan dana biasa tanpa harus terikat dengan ketentuan ataupun syarat yang ada. Dengan adanya penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, maka akan menimbulkan dampak kepada penyelenggara itu sendiri. Sehingga diharapkan untuk penyelenggaraan PUB selanjutnya, bisa mengikuti standar ketentuan dan syarat yang berlaku. Oleh karena itu, praktikan merasa perlu adanya rencana intervensi terkait dengan sosialisasi penyelenggaraan PUB yang sesuai.

b. Tujuan Umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum yang ingin dicapai, yaitu pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan PUB kemasyarakatan di Desa Soreang

2) Tujuan Khusus

- a) Terselenggaranya PUB yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya
- b) Membentuk pemuda karang taruna yang mengerti mengenai ketentuan dan syarat dari Penyelenggaraan PUB
- c) Pencegahan terjadinya tindak KKN dalam penyelenggaraan PUB
- d) Terselenggaranya PUB yang sesuai dengan prinsip dan etika yang berlaku
- e) Tercapainya tujuan dari bantuan sosial itu sendiri

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang akan dilaksanakan, yaitu “ Peningkatan Pelaksanaan PUB yang Berkualitas Bersama Karang Taruna Cerdas” Kegiatan dalam program akan meliputi pengedukasian lewat penyuluhan kepada Karang Taruna Desa Soreang, terkait dengan penyelenggaraan PUB yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini :

Tabel 2.9 Bentuk Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana Kegiatan
1	Penyuluhan dan diskusi tentang PUB	Karang Taruna tau dan paham mengenai peraturan dan mekanisme penyelenggaraan PUB	Dinas sosial Kabupaten Bandung
2	Pendampingan dalam penyusunan syarat-syarat PUB	Karang taruna memiliki keterampilan dalam penyusunan syarat PUB	Praktikan selaku Pekerja Sosial

Sumber : Praktikan Tahun 2023

d. Sistem partisipan

Berikut adalah orang-orang yang akan berpartisipasi dalam program kegiatan ini :

Tabel 2.10 Sistem Partisipan

System	Definition	System Representative
Initiator	Orang yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah penyelenggaraan PUB	Praktikan selaku Pekerja Sosial
Agent of change	Pekerja Sosial profesional, lembaga, atau yang lainnya, yang mengkoordinasikan usaha perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial (Praktikan) dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung
Client	Penerima manfaat primer dan sekunder	Karang Taruna selaku penyelenggara PUB
Support	Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan dalam pemecahan masalah.	Dinas Sosial Kabupaten Bandung, pemerintahan desa, dan lembaga kesejahteraan sosial.
Controlling	Orang atau orang2 yang mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk	Kepala desa dan ketua Karang Taruna

	menyetujui perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	
Host	Bagian dari organisasi atau masyarakat yang memberikan naungan secara administrasi dalam intervensi	Pengurus Karang Taruna
Implementing	Staf atau voluntir yang melaksanakan intervensi	Pekerja sosial dan seorang inisiator
Target	Pihak-pihak yang harus dirubah agar intervensi dapat berhasil	Karang Taruna sebagai Penyelenggara PUB
Action	Orang yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yg bertanggung jawab mengawal upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas.	Inisiator, agen perubahan, dan voluntir..

Sumber : Praktikan Tahun 2023

e. Metode dan Teknik

1) Metode *Community Organization Community Development* (COCD)

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958).

Community Work adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Alan Tvevetrees, 1993).

2) Teknik Penyuluhan dan Fasilitasi

a) Penyuluhan

Penyuluhan, yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Penyuluhan dilakukan dengan menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya.

b) Fasilitasi

Fasilitasi merupakan teknik untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitatornya merupakan pekerja sosial atau praktikan.

3) *Focus Group Discussion*

FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

f. **Rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan**

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.11 RAB

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Administrasi				
	Proposal pengajuan	50	Lembar	500	25.000
	Surat Undangan	50	Lembar	500	25.000
	Pamflet Materi	50	Lembar	1.000	50.000
Jumlah 1					100.000
2	Logistik				
	Spanduk 4x2	1	Buah	100.000	100.000
Jumlah 2					100.000
3	Honorarium Narasumber Kegiatan Penyuluhan				
	Dinas Sosial Kabupaten Bandung	2	Orang	5.000.000	1.000.000
Jumlah 3					1.000.000
4	Konsumsi				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	Snack Peserta	35	Orang	10.000	350.000
	Snack Perwakilan Pemerintah Desa	2	Orang	10.000	20.000
	Makan Siang Narasumber	2	Orang	20.000	40.000
	Makan siang peserta	35	Orang	20.000	700.000
	Makan Perwakilan	2	Orang	20.000	40.000

	Desa				
	Air Mineral	5	Dus	15.000	75.000
Jumlah 4					1.245.000
Jumlah Keseluruhan : 2.445.000					

Sumber : Praktikan Tahun 2023

Adapun alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan program, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.12 Alat yang dibutuhkan

No	Alat	Jumlah	Satuan
1	Sound System	1	Buah
2	Michrophone	2	Buah
3	Proyektor	1	Buah
4	Laptop	2	Buah
5	Kabel Roll	3	Buah
6	Banner	1	Buah
7	Meja	3	Buah
8	Kursi	100	Buah
9	Taplak Meja	3	Buah

g. Analisi kelayakan program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman di dalam program “Peningkatan Pelaksanaan PUB yang Berkualitas Bersama Karang Taruna Cerdas”

Uji Kelayakan Program

Tabel 2.13 Uji Kelayakan Program

	Strength	Weakness
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya antusiasme dari Karang taruna untuk mempelajari hal baru • Karang taruna mau untuk melakukan perubahan • Karang Taruna merasa program ini sangat dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan dari Karang Taruna
EKSTERNAL		
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari Pemerintah Desa Soreang • Desa soreang memiliki koordinasi yang baik antarlembaganya. • Memiliki banyak sistem sumber yang bisa digunakan khususnya sistem sumber kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak demi berjalannya kegiatan program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengetahuan mengenai PBU • Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelatihan pembuatan persyaratan PBU yang sesuai dengan aturan
Threats	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Ini merupakan kegiatan sosialisasi pertama yang dilakukan secara komunitas, sehingga berpotensi terjadinya <i>trial and error</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait • Melakukan Kerjasama dengan tim kerja dan mempersiapkan kegiatan dengan matang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim kerja dan pekerja sosial melakukan fasilitasi dalam kegiatan sosialisasi dan pekerja sosial melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelatihan pembuatan syarat-syarat penyelenggaraan PUB

Sumber : Praktikan Tahun 2023

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Program Peningkatan Pelaksanaan PUB yang Berkualitas Bersama Karang Taruna Cerdas layak untuk dijalankan, karena Strength (S) lebih besar daripada Weakness (W) dan Opportunity (O) lebih besar daripada Threats (T).

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistematis dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan, sebagai berikut :

Table 2.14 Jadwal dan langkah program

Langkah Kegiatan	April	Mei		
	4	Minggu Ke		
		1	2	3
1. Persiapan				
Membentuk Kelompok Diskusi				
Melakukan rapat mengenai kegiatan dan jadwal kegiatan				
Membuat proposal kegiatan dan undangan				
Mengurus perizinan dan menyebarkan undangan				
Menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan				
2. Pelaksanaan Sosialisasi				
Sambutan dari perwakilan desa				
Penyuluhan dan diskusi tentang penyelenggaraan PUB				
3. Pendampingan dan fasilitasi				
Pendampingan dan fasilitasi dalam pelatihan penyusunan syarat-syarat PUB				
4. Pengakhiran				
Evaluasi dan monitoring				
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban				
Pembubaran TKM				

Kegiatan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

4) Persiapan

a) Membentuk Kelompok Diskusi

Kelompok diskusi untuk program “ Peningkatan Pelaksanaan PUB yang Berkualitas Bersama Karang Taruna Cerdas”, terdiri dari seluruh anggota Karang Taruna Desa Soreang.

b) Melakukan Rapat

Rapat dilakukan untuk membahas mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja. Rapat ini diadakan di kantor desa. Adapun dalam rapat ini akan membahas terkait dengan siapa saja yang akan mengisi acara dan bagaimana agenda kegiatan, serta hal lain yang termasuk dalam konsep kegiatan.

c) Membuat proposal kegiatan dan undangan

Membuat proposal sebagai bentuk perizinan program serta undangan untuk Perwakilan desa dan narasumber

d) Perizinan dan menyebarkan undangan

Praktikan dan humas akan mengunjungi kantor desa dengan tujuan melakukan perizinan atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

e) Menyiapkan alat

Para pemuda karang taruna akan mengambil peran dalam kegiatan ini, di mana para pemuda tersebut yang akan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan program.

5) Pelaksanaan

a) Pelaksanaan Sosialisasi

Rundown pelaksanaan kegiatan yang berisi agenda pelaksanaan program terlampir.

b) Pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi

Setelah kegiatan sosialisasi, Pekerja sosial akan mulai melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Karang Taruna dalam pelatihan penyusunan syarat-syarat PUB yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan teknik FGD.

6) Pengakhiran

a) Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam program ini dilakukan dengan pembuatan angket yang disebarkan kepada ex partisipan program beberapa hari setelah program dilaksanakan. Pembagian kuesioner dilakukan oleh praktikan, sama seperti pada saat membagikan surat undangan.

b) Pembuatan LPJ

Setelah kegiatan evaluasi selesai, selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada desa.

2.3 Profil Pemberdayaan Sosial

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Praktik pemberdayaan masyarakat di tiap daerah pasti berbeda-beda, sesuai dengan potensi dan sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri. Desa Soreang sendiri, memiliki berbagai kegiatan pemberdayaan, baik dari pemberdayaan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan lain sebagainya.

Berbagai kegiatan pemberdayaan yang praktikan temui, yaitu seperti pemberdayaan Lingkungan dengan mengelola sampah menjadi kerajinan tangan, pemberdayaan remaja dengan posyandu remaja, pemberdayaan KPM PKH dengan program kewirausahaan, pemberdayaan fakir miskin dengan kegiatan budidaya maggot, pemberdayaan WTS oleh dinas sosial, dan pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui program Usaha PEKA. Kegiatan pemberdayaan tersebut sudah terbukti dapat meningkatkan kemandirian, partisipasi dan jaringan kerja masyarakat yang diberdayakan. Namun, dalam proses pemberdayaan tersebut tentu seringkali terdapat kendala ataupun masalah yang menyebabkan kegiatan menjadi kurang optimal.

Kurangnya optimalnya kegiatan pemberdayaan yang praktikan temui di atas, disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu mulai dari tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang masih sangat minim, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk pelatihannya, kendala dalam modal untuk melakukan suatu pemberdayaan, tidak adanya pelatihan kewirausahaan sehingga para penerima manfaat kurang bisa mengelola usaha, seperti pengelolaan modal, profit, dan sebagainya. Selain itu juga masalah SDM sebagai pengelola atau penggerak pemberdayaan yang terbatas, karena jadwal yang padat.

Dari berbagai Isu Masalah yang praktikan temui di Desa Soreang terkait dengan program pemberdayaan, praktikan tertarik dengan program pemberdayaan PEKA. Di mana program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) ini merupakan program yang dirancang oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (KB), dengan pemberian modal kepada kelompok PEKA itu sendiri untuk melakukan suatu kegiatan usaha. PEKA di Desa Soreang sendiri memiliki fokus usaha, yaitu usaha *catering* makanan berat dan jajanan. Program ini terbukti sudah cukup membantu para PEKA dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, terdapat suatu kendala dalam pelaksanaannya, yaitu dalam pemutaran profit usaha.

Di mana para pekerja merasa bingung dan keberatan ketika akan melakukan produksi karena kendala modal, sedangkan proses produksi hampir dilakukan setiap hari, namun profit yang didapatkan dirasa kurang untuk memodali produksi selanjutnya. Hal tersebut disebabkan karena kelompok usaha PEKA ini hanya diberikan modal berupa uang saja, namun tidak diberikan pelatihan usaha seperti manajemen usaha. Sehingga pengelolaan modal atau profit usaha dirasa kurang maksimal.

2.3.2 Tinjauan konsep

a. Konsep Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Senada dengan yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmitha, menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya ditujukan guna : *“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.”* (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

b. Konsep PEKKA

Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga adalah program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Program ini bertujuan agar perempuan kepala keluarga dapat berdaya, yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3APM). Di Desa Soreang sendiri, program PEKKA ini dirancang untuk para perempuan kepala keluarga dapat mengelola suatu usaha. Kegiatan program ini meliputi pemberian modal dan pelatihan soft skill kepada kelompok pekka itu sendiri.

Program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) sesuai dalam UUD 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada azasnya penganut prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan dalam segala bidang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, dilanjutkan pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas kerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Konsep Manajemen Usaha

Manajemen usaha adalah kegiatan mengatur suatu usaha agar bisa berjalan dengan baik. Hal ini biasanya mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengelola aset dan melibatkan strategi pemasaran. Manajemen usaha tidak hanya diterapkan untuk suatu bisnis besar saja, semua lini bisnis dari usaha kecil sekalipun sebaiknya menerapkan kegiatan ini.

Pentingnya manajemen usaha tidak dapat diremehkan atau diabaikan karena ini adalah fakta yang terbukti bahwa keberhasilan usaha sepenuhnya bergantung pada seberapa baik pengelolaannya. Berikut mengapa manajemen bisnis penting untuk bisnis apa pun:

1) Menyelaraskan tujuan

Sebuah perusahaan terdiri dari majikan dan beberapa karyawan yang bekerja sama. Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Manajemen memberi mereka arah yang sama untuk mencapai tujuan mereka bersama.

2) Pemanfaatan sumber daya terbaik

Pemanfaatan sumber daya yang tepat sangat penting bagi organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Manajemen membantu dalam pembagian kerja dan mencegah karyawan dari kinerja yang buruk atau terlalu terbebani dengan pekerjaan.

3) Meminimalisir biaya

Manajemen membantu menggabungkan semua faktor produktivitas dan mengaturnya. Ini melibatkan pemanfaatan sumber daya terbaik yang mencegah pemborosan waktu dan upaya, yang pada akhirnya mengurangi pemborosan uang.

4) Meningkatkan efisiensi

Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan hasil yang paling efisien yaitu mencapai keuntungan yang maksimal dengan memaksimalkan output dan meminimalkan input.

Manajemen usaha melibatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan membantu dalam pengurangan biaya. Kedua faktor ini secara konsekuen meningkatkan efisiensi perusahaan.

2.3.3 Asesmen

a. Identifikasi Masalah

1) Masalah

Dalam identifikasi masalah dan pengumpulan data, praktikan menggunakan metode wawancara pada saat melakukan home visit dan community involvement di masyarakat maupun kantor desa. Pihak yang diwawancarai, antara lain :

- a) Ibu Tuting selaku PSM di Desa Soreang pada tanggal 9 Maret 2023
- b) Ibu Idas selaku anggota PEKKA di Desa Soreang pada tanggal 9 Maret 2023
- c) Ibu Eti selaku pengurus Program PEKKA di Desa Soreang pada tanggal 14 Maret 2023

Dari wawancara tersebut, didapatkan beberapa masalah terkait Program PEKKA di Desa Soreang, sebagai berikut :

- a) Masalah utamanya adalah belum adanya manajemen usaha yang baik dalam kegiatan usaha *catering* oleh PEKKA, sehingga menimbulkan masalah-masalah lainnya;
- b) Kegiatan usaha kurang efektif dan efisien, karena belum memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin;
- c) Kesulitan dalam pemutar modal, yaitu masih merasa kekurangan modal untuk kegiatan produksi selanjutnya;
- d) Kurang optimalnya manajemen pemasukan dan pengeluaran usaha;
- e) Kurangnya keterampilan dalam meminimalisir pengeluaran.

2) Penyebab masalah

Penyebab yang menjadi masalah utama, yaitu belum adanya manajemen usaha yang baik dalam usaha *catering* oleh kelompok PEKKA sehingga menyebabkan masalah-masalah lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Belum ada sosialisasi mengenai manajemen usaha sebelumnya kepada kelompok PEKKA, sehingga mereka kurang memahami mengenai cara dalam mengelola usaha dengan baik;

- b) Belum adanya pelatihan untuk manajemen usaha, sehingga kelompok PEKKA ini tidak memiliki keterampilan akan hal tersebut.

3) Dampak Masalah

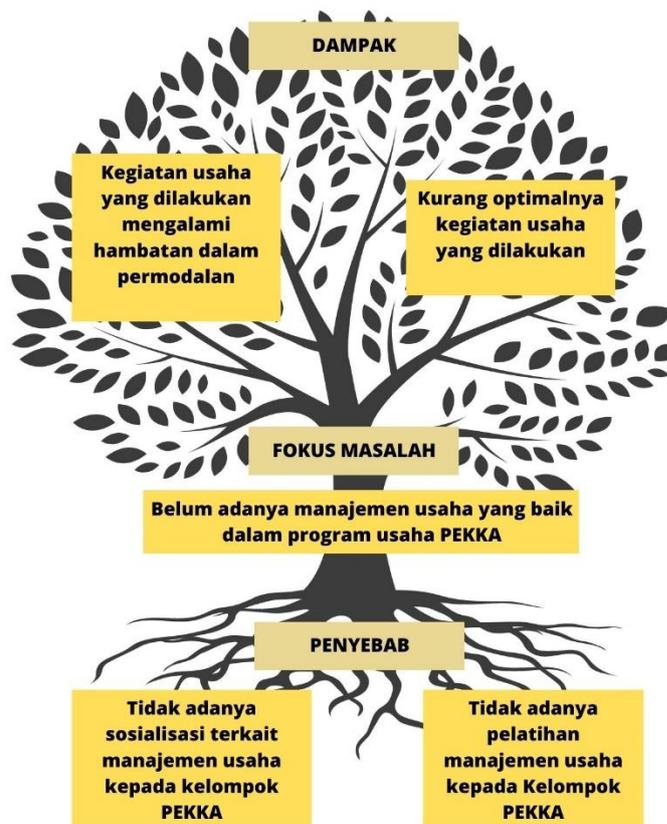
Masalah yang ditimbulkan dari penyebab-penyebab di atas, tentunya memiliki dampak bagi kegiatan usaha kelompok PEKKA itu sendiri, dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan usaha yang dilakukan mengalami hambatan dalam permodalan.
- b) Kurang optimalnya kegiatan usaha yang dilakukan.

4) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan praktikan dengan pengurus program PEKKA, bahwa masalah utama yang sangat mengganggu kegiatan usaha oleh kelompok PEKKA adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan kelompok PEKKA dalam manajemen usaha.

Agar lebih mudah memahami mengenai fokus masalah yang akan dikaji, praktikan mengilustrasikannya dengan alat bantu masalah, yaitu pohon masalah sebagai berikut :



Gambar 2.4 Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab-penyebab yang menjadi faktor terjadinya permasalahan, yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam bagian daun.

Penjelasan :

Berangkat dari belum adanya sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok PEKKA terkait manajemen usaha yang baik guna mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan usaha, sehingga kelompok PEKKA dalam kegiatan berusahanya belum menggunakan manajemen yang baik. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak bagi kegiatan usaha kelompok PEKKA itu sendiri. Dengan tidak adanya manajemen usaha, mereka merasa kesulitan dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan, pemutaran modal, dan sebagainya. Hal ini tentu membuat kegiatan usaha menjadi terhambat dan kurang optimal.

b. Identifikasi Kebutuhan

Melihat dari penyebab masalah yang sudah dijelaskan di atas, bahwa belum adanya manajemen usaha yang baik dalam kegiatan usaha oleh kelompok PEKKA dikarenakan oleh belum adanya sosialisasi dan pelatihan manajemen usaha. Maka yang kelompok PEKKA butuhkan adalah kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terlebih dahulu terkait apa itu manajemen usaha, lalu pelatihan agar kelompok PEKKA tidak sekedar tau, namun juga memiliki keterampilan tentang manajemen usaha.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Sistem sumber informal

Bentuk dari sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu dukungan dan pemberian motivasi oleh rekan kelompok PEKKA, sehingga bisa memiliki dorongan untuk melakukan perubahan.

2) Sistem sumber formal

Bentuk dari sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu kelompok PEKKA itu sendiri dan pemerintahan Desa Soreang.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini, yaitu para PSKS yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial seperti dinas sosial Kabupaten Bandung, Pekerja Sosial Masyarakat, dan para Fasilitator Desa Soreang. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan KB sebagai pembentuk program juga termasuk sistem sumber kemasyarakatan.

2.3.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Menyandang status janda atau belum menikah bukanlah hal yang diinginkan setiap perempuan. Namun, keadaan lah yang mengharuskan mereka melewati takdir tersebut. Dalam menjalani kehidupannya mereka membutuhkan kemandirian terutama dalam menghidupi diri dan keluarganya. Status tersebut memberikan beban tersendiri dan sekaligus juga menjadi tantangan bagi mereka. Tidak banyak dari mereka yang berputus asa dan tidak bisa menerima keadaan tersebut. Patut kita hargai, karena masih ada perempuan yang masih memiliki semangat untuk bisa mempertahankan diri dan menjadi pribadi yang lebih berdaya.

Sebagai single parent (janda) sudah menjadi kenyataan bahwa kewajiban dalam mencari nafkah sudah berpindah ke tangannya sejak suaminya pergi baik itu meninggal atau pun bercerai. Berubah status menjadi kepala keluarga tentunya mereka harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa meneruskan kehidupan. Banyak dari mereka memilih untuk berdagang kecil-kecilan seperti menjual makanan keliling kampungnya. Atau menjual barang-barang seperti kerudung, atau pakaian perempuan. Ada pula yang ahli di bidang kerajinan, namun terkadang perempuan yang melakukan hal tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memasarkannya ataupun terkendala dalam modal. Hal inilah yang perlu diperhatikan, karena mereka membutuhkan bimbingan agar mereka bisa mengasah potensi mereka masing-masing dan tentunya mereka bisa menjadikan potensi mereka sebagai jalan keluar untuk meningkatkan ekonomi keluarganya.

Pemberdayaan perempuan dalam kondisi seperti ini sangatlah diperlukan. Agar perempuan yang mengalami kondisi seperti itu, tidak terpuruk dan putus asa. Diperlukannya kegiatan-kegiatan yang menggali potensi mereka dan mengarahkannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang nantinya menjadi modal mereka dalam menghadapi kehidupannya. Pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks keluarga sangat penting. Kaum perempuan memiliki potensi untuk berkembang.

Kaum perempuan juga memiliki banyak potensi yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Maka ketika potensi itu disatukan, akan menghaikan energi untuk keluar dari kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan pada akhirnya kesejahteraan keluarga dapat diraih. (Anwas, 2014, hal. 149).

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara praktikan dengan salah satu narasumber yang ada di Desa Soreang, pada akhir tahun 2013 ada satu program di Soreang yang dikhususkan untuk membantu kehidupan kaum perempuan yang menyangkut status janda, program tersebut adalah PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Program ini digagas sebagai bentuk respon Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3APM). Kepada jumlah Perempuan Kepala Keluarga di Desa Soreang yang cukup tinggi.

Program PEKKA di desa Soreang untuk tahun ini berjumlah 10 anggota, di mana kegiatan program tersebut adalah berupa pemberian modal sebesar 15 Juta kepada kelompok PEKKA itu sendiri, untuk membuat suatu usaha, yaitu usaha *catering*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus dan anggota PEKKA, yaitu Ibu Eti dan Ibu Idas, bahwa program tersebut sudah cukup membantu para PEKKA untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Di mana usaha Catering ini sudah cukup dikenal dan sudah cukup tinggi untuk income setiap harinya.

Namun, dari income yang dihasilkan pada setiap produksi, dinilai kurang cukup untuk memodali kegiatan produksi selanjutnya. Para PEKKA ini masih merasa kesulitan dalam memodali kegiatan produksi selanjutnya, apalagi jika produksi setelahnya memiliki jumlah yang lebih banyak. Hal ini di sebabkan dalam kegiatan program, PEKKA hanya diberikan modal dan arahan usaha saja, namun tidak ada pelatihan dalam manajemen usaha. Sehingga mereka merasa kesulitan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran dan tidak bisa meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan di rasa kurang berjalan dengan baik atau kurang optimal.

Oleh karena itu, dari permasalahan yang ada, praktikan tertarik untuk melakukan suatu rencana intervensi, yaitu pemberian pelatihan dalam manajemen usaha, sehingga usaha yang dilakukan oleh PEKKA sebagai suatu upaya pemberdayaan bisa berjalan dengan optimal.

b. Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan manajemen usaha dalam program usaha PEKKA.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan kemampuan PEKKA dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan.
- b) Meningkatkan kemampuan PEKKA dalam mengefisienkan biaya pengeluaran.
- c) Mengoptimalkan kegiatan usaha sebagai bentuk pemberdayaan kepada PEKKA.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang akan dilaksanakan, yaitu “ Peningkatan Keterampilan Usaha Perempuan Mandiri” (PKUPM) Kegiatan dalam program ini akan meliputi pelatihan dan penguasaan kepada kelompok PEKKA Desa Soreang, terkait dengan Manajemen Usaha. Berikut adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini :

Tabel 2.16 Bentuk Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana Kegiatan
1	Edukasi dan diskusi tentang Manajemen Usaha	Kelompok PEKKA dapat memahami terkait manajemen usaha	Dinas sosial Kabupaten Bandung
2	Pelatihan dalam peningkatan manajemen usaha <i>Catering</i>	Kelompok PEKKA dapat mengimplementasikan manajemen usaha yang baik dan benar	Praktikan selaku Pekerja Sosial

d. Sistem Partisipan

Tabel 2.17 Sistem Partisipan

System	Definition	System Representative
Initiator	Orang yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah dalam manajemen usaha PEKKA	Praktikan selaku Pekerja Sosial

Agent of change	Pekerja Sosial profesional, lembaga, atau yang lainnya, yang mengkoordinasikan usaha perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial (Praktikan) dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung
Client	Penerima manfaat primer dan sekunder	Kelompok PEKKA
Support	Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan dalam pemecahan masalah.	Dinas Sosial Kabupaten Bandung, pemerintahan desa, dan lembaga kesejahteraan yang ada di Desa Soreang
Controlling	Orang atau orang2 yang mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	Dinas Pemberdayaan perempuan KB dan Pengelola PEKKA
Host	Bagian dari organisasi atau masyarakat yang memberikan naungan secara administrasi dalam intervensi	Pengelola PEKKA
Implementing	Staf atau voluntir yang melaksanakan intervensi	Pekerja sosial dan seorang initiator
Target	Pihak-pihak yang harus dirubah agar intervensi dapat berhasil	Kelompok PEKKA
Action	Orang yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yg bertanggung jawab mengawal upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas.	Inisiator, agen perubahan, dan voluntir.

Sumber : Praktikan Tahun 2023

e. Metode dan Teknik

1) Metode *Community Organization Community Development* (COCD)

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958).

2) Teknik Penyuluhan dan Fasilitasi

a) Edukasi

Secara umum, edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik.

Selain itu, menurut *Mubarak dan Chayatin*, edukasi adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tidak hanya dari segi teori dan prosedur dari orang ke orang lain, melainkan juga perubahan terjadi karena menimbulkan kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri.

b) Capacity Building

Peningkatan Kapasitas (*capacity building*) yaitu merupakan teknik yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku. Dalam hal ini, teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota PEKA dalam melakukan Manajemen Usaha.

c) Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.18 RAB

No	Uraian	Volum	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Administrasi				
	Proposal pengajuan	50	Lembar	500	25.000
	Surat Undangan	20	Lembar	500	10.000
	Pamflet Materi	20	Lembar	1.000	20.000
Jumlah 1					55.000
2	Logistik				
	Spanduk 4x2	1	Buah	100.000	100.000
Jumlah 2					100.000
3	Honorarium Narasumber Kegiatan Penyuluhan				
	Dinas Sosial Kabupaten Bandung	2	Orang	500.000	1.000.000
Jumlah 3					1.000.000
4	Konsumsi				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	Snack Peserta	10	Orang	10.000	100.000
	Snack Perwakilan Pemerintah Desa	2	Orang	10.000	20.000
	Makan Siang Narasumber	2	Orang	20.000	40.000
	Makan siang peserta	10	Orang	20.000	200.000
	Makan Perwakilan Desa	2	Orang	20.000	40.000
	Air Mineral	2	Dus	15.000	30.000
Jumlah 4					450.000
Jumlah Keseluruhan : 1.605.000					

Adapun alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan program, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.19 Alat yang dibutuhkan

No	Alat	Jumlah	Satuan
1	Sound System	1	Buah
2	Michrophone	2	Buah
3	Proyektor	1	Buah
4	Laptop	2	Buah
5	Kabel Roll	3	Buah
6	Banner	1	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman di dalam program “ Peningkatan Keterampilan Usaha Perempuan Mandiri ”.

Tabel 2.20 Uji Kelayakan Program

	Strength	Weakness
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya antusiasme dari kelompok PEKKA untuk mempelajari hal baru • Kelompok PEKKA mau untuk melakukan perubahan • Kelompok PEKKA merasa program ini sangat dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan dari Kelompok PEKKA
EKSTERNAL		
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan KB • Desa soreang memiliki koordinasi yang baik antarlembaganya. • Memiliki banyak sistem sumber yang bisa digunakan khususnya sistem sumber kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak demi berjalannya kegiatan program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengetahuan mengenai Manajemen Usaha • Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelatihan manajemen usaha
Threats	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pertama yang dilakukan oleh kelompok PEKKA sehingga berpotensi terjadinya <i>trial and error</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait • Melakukan Kerjasama dengan tim kerja dan mempersiapkan kegiatan dengan matang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim kerja dan pekerja sosial melakukan fasilitasi dalam kegiatan sosialisasi dan pekerja sosial melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelatihan manajemen usaha

Sumber : Praktikan Tahun 2023

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Program “ Peningkatan Keterampilan Usaha Perempuan Mandiri ” layak untuk dijalankan, karena Strength (S) lebih besar daripada Weakness (W) dan Opportunity (O) lebih besar daripada Threats (T).

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistematis dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan.

Tabel 2.21 Jadwal dan langkah Program

Langkah Kegiatan	Juni			
	Minggu Ke			
	1	2	3	4
1. Persiapan				
Melakukan rapat mengenai kegiatan dan jadwal kegiatan				
Membuat proposal kegiatan dan undangan				
Mengurus perizinan dan menyebarkan undangan				
Menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan				
2. Pelaksanaan Edukasi				
Edukasi dan diskusi tentang Manajemen Usaha				
3. Pendampingan dan fasilitasi				
Pendampingan dan fasilitasi dalam pelatihan manajemen usaha				
4. Pengakhiran				
Evaluasi dan monitoring				
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban				

Kegiatan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

1) Persiapan

- a) Membentuk Kelompok Diskusi
Kelompok Diskusi dari Program “ Peningkatan Keterampilan Usaha Perempuan Mandiri”, terdiri dari pengelola dan anggota program usaha PEKKA.
- b) Melakukan Rapat
Rapat dilakukan untuk membahas mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja. Rapat ini diadakan di kantor desa.

Adapun dalam rapat ini akan membahas terkait dengan siapa saja yang akan mengisi acara dan bagaimana agenda kegiatan, serta hal lain yang termasuk dalam konsep kegiatan.

- c) Membuat proposal kegiatan dan undangan
Sekretaris dalam kepanitiaan akan diminta untuk membuat proposal sebagai bentuk perizinan program serta undangan untuk Perwakilan desa, narasumber, dan Kelompok PEKKA yang menjadi sasaran program.
- d) Perizinan dan menyebarkan undangan
Praktikan akan mengunjungi kantor desa dengan tujuan melakukan perizinan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu setelah itu akan menyebarkan undangan ke sasaran program.
- e) Menyiapkan alat
Praktikan akan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan program.

2) Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan Edukasi
Edukasi dan diskusi akan dilaksanakan bersama kelompok diskusi yang telah disusun. Di mana di dalamnya memuat pengedukasian terkait manajemen usaha, bagaimana penerapannya, dan lain sebagainya.
- b) Pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi
Setelah kegiatan sosialisasi, Pekerja sosial akan melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kelompok PEKKA dalam pelatihan Manajemen Usaha.

3) Pengakhiran

- a) Evaluasi kegiatan
Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam program ini dilakukan dengan pembuatan angket yang disebarkan kepada ex partisipan program beberapa hari setelah program dilaksanakan. Pembagian kuesioner dilakukan oleh humas, sama seperti pada saat membagikan surat undangan.
- b) Pembuatan LPJ
Setelah kegiatan evaluasi selesai, selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran.

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

2.4.1 Gambaran Umum Masalah

Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.

Manusia hidup dan tinggal dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik, baik biotik, maupun abiotik. Manusia juga melakukan interaksi dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya dan mengembangkan nilai dan norma untuk mengatur interaksi tersebut. Dari interaksi tersebut, manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti bahasa, teknologi, dan lain sebagainya.

Namun, sejalan dengan berkembangnya kebudayaan dan kebutuhan dari manusia itu sendiri, interaksi manusia dengan lingkungannya mengalami perubahan.

Manusia cenderung lebih *eksploitatif* dan *Antroposentrisme*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, membuat lingkungannya menjadi tidak seimbang bahkan rusak.

Perubahan lingkungan memang tidak hanya disebabkan oleh manusia, namun, manusia menjadi faktor terbesar yang menyebabkan perubahan lingkungan, baik alam, sosial, budaya maupun ekonomi. Tingkat pertumbuhan manusia yang tinggi, sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup, kebutuhan manusia yang sangat beragam, kesadaran manusia akan lingkungan, bahkan kesenjangan sosial antar manusia juga merupakan faktor penyebab perubahan lingkungan.

Oleh karena itu, perlu adanya penataan lingkungan, guna terciptanya mutu lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Selain itu, penataan lingkungan juga diperlukan guna terciptanya pengelolaan lingkungan secara terencana, rasional, dan optimal sesuai dengan daya dukungnya.

Di lingkungan yang menjadi lokasi praktikum, yaitu Desa Soreang, memiliki beberapa isu masalah lingkungan, yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti isu masalah manusia dengan lingkungan alam atau fisik dan isu masalah manusia dengan lingkungan sosialnya. Beberapa masalah yang kami temukan, yaitu terkait dengan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan, pembuangan limbah rumah tangga dan sampah di sungai dan irigasi, penutupan irigasi sehingga menyebabkan banjir dan pengelolaan sampah yang kurang baik.

Dari beberapa permasalahan di atas, praktikan tertarik untuk membahas terkait pembuangan sampah dan penutupan irigasi oleh beberapa masyarakat Desa Soreang.

Di mana dari hasil wawancara praktikan dengan Pak Iyus selaku bagian Pelayanan Publik di Kantor Desa Soreang, bahwa ada masyarakat yang membuang sampah ke irigasi dan bahkan menutup irigasi dengan cara disemen. Hal tersebut diakibatkan karena irigasi sering mampet sehingga airnya meluap, selain itu juga untuk memperluas jalan.

Sikap manusia yang sering mengabaikan lingkungannya guna mempermudah hidupnya, dapat mengakibatkan perubahan pada lingkungan itu sendiri. Perubahan di sini bisa berupa kerusakan atau disfungsi. Di mana lingkungan tersebut tidak bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya.

Masyarakat Desa Soreang, yang sering membuang limbah rumah tangga ataupun sampah lainnya ke irigasi, menyebabkan irigasi tersebut menjadi tercemar kandungan air maupun tanahnya. Hal tersebut juga bisa menyebabkan tersumbatnya aliran air, sehingga berpotensi banjir. Selain itu, irigasi tersebut terlihat kumuh atau menimbulkan polusi visual.

2.4.2 Tinjauan konsep

a. Konsep Lingkungan

a. Pengertian Lingkungan

Menurut Otto Soemarwoto, pengertian lingkungan adalah seluruh benda dan kondisi yang terdapat di dalam ruang yang ditempati oleh manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Emil Salim, arti lingkungan adalah semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang ada di dalam ruangan yang saat ini ditempati serta mempengaruhi kehidupan, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan.

Selain itu, Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, konsep lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk yang hidup di bumi.

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa setiap komponen dalam lingkungan saling berkaitan dan berpengaruh satu dengan yang lain. Di mana dalam lingkungan hidup terhadap ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan secara menyeluruh dan saling berpengaruh dalam membentuk keseimbangan dan stabilitas kehidupan alam.

Dengan begitu, jika salah satu komponen mengalami gangguan, tentu akan memberikan pengaruh pada komponen lain dalam ekosistem.

b. Jenis Lingkungan Hidup

a) Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alam. Di dalam lingkungan hidup alami, akan terjadi interaksi yang membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan ekosistem.

Lingkungan hidup alami ini dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah lingkungan hidup di air yang meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Kedua adalah lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput.

b) Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dari lingkungan ini adalah bentuknya yang tidak beragam dan hanya satu jenis.

Contoh lingkungan hidup buatan manusia adalah jalan, perkampungan kawasan industri, sekolah, dan taman.

c. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup unsur-unsur di dalamnya. Adapun fungsi dari lingkungan hidup, antara lain:

a) Sebagai Tempat Untuk Mendapatkan Makan

Lingkungan hidup menjadi sumber untuk mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik.

b) Sebagai Tempat Untuk Beraktivitas

Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukannya.

c) Sebagai Tempat Untuk Tinggal

Lingkungan hidup dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk hidup. Karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya agar kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik.

b. Konsep Irigasi

a. Pengertian Irigasi

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Apabila berbicara tentang irigasi, orang selalu berpikir tentang satu sistem infrastruktur yang rigid dan itu tidak selamanya benar. Teori tentang manajemen, irigasi dapat dibahas dari sudut pandang sebuah sistem karena mempunyai unsur-unsur yang saling kait-mengait untuk mencapai satu tujuan manajemen.

Sebagai suatu sistem pengaliran maka Peraturan Menteri PUPR No.30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi menganggap irigasi terdiri atas lima (5) pilar irigasi yaitu: (i) ketersediaan air; (ii) infrastruktur; (iii) pengelolaan irigasi; (iv) institusi irigasi; dan (v) manusia pelaku. Kelima unsur tersebut harus saling bersesuaian, berhubungan dan saling terkait sehingga dapat dikatakan bahwa irigasi merupakan suatu sistem. Masing-masing unsur tersebut disebut sebagai sub sistem.

Pada prinsipnya irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber air, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikan ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang.

b. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Irigasi

a) Tujuan Irigasi

- Air yang tersedia dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- Air yang tersedia dibagi secara adil dan merata.
- Air yang diberikan ke petak-petak tersier secara tepat cara, waktu dan jumlah, sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman.
- Akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air berlebihan dapat dihindari.

b) Fungsi

Mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

c) Manfaat

- Melancarkan aliran air ke lahan persawahan.
- Menyuburkan/meningkatkan kesuburan tanah.
- Sebagai tempat budidaya tumbuhan.
- Pengatur suhu dalam tanah.

c. Jenis Irigasi

a) Irigasi Permukaan

Irigasi permukaan adalah sistem irigasi dimana air digenangkan pada tanaman dan dialirkan lewat permukaan tanah, misalnya sistem irigasi pada sawah. Sistem irigasi ini dilakukan oleh sebagian besar petani dalam budidaya pada sawah.

b) Irigasi Air Tanah

Irigasi air tanah adalah sistem irigasi dimana sumber airnya dari bawah tanah dan dialirkan jaringan irigasi permukaan atau perpipaan dengan menggunakan pompa. Sistem irigasi ini dilakukan pada daerah yang air permukaannya sangat terbatas.

c) Jaringan Irigasi Pompa

Jaringan irigasi pompa adalah sistem irigasi permukaan yang pengambilan airnya di sungai atau sumber lainnya dengan menggunakan pompa air.

d) Jaringan Irigasi Rawa

Jaringan irigasi rawa adalah sistem irigasi permukaan yang pengambilan airnya dari rawa.

e) Jaringan Irigasi Tambak

Jaringan irigasi tambak adalah sistem irigasi untuk keperluan budidaya tambak ikan.

c. Konsep Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah sebuah pandangan bahwa manusia lebih unggul dari semua organisme lain. Fokus dalam pandangan ini terutama pada manusia, dan hewan dan alam hanyalah latar belakang.

Antroposentrisme adalah konsep utama di bidang etika lingkungan dan filsafat lingkungan. Hal ini karena antroposentrisme seringkali dianggap sebagai akar masalah yang muncul akibat interaksi manusia dengan lingkungan.

Posisi manusia dalam antroposentrisme berada di tempat teratas, sedangkan yang lain tidak begitu penting. Beberapa contoh cabang studi yang merupakan implementasi dari antroposentrisme adalah perspektif manusia adalah seperti filsafat dan psikologi.

Ada juga yang menyebut bahwa antroposentrisme merupakan elemen dasar dari sifat manusia karena manusia selalu menggunakan sumber daya alam, termasuk tumbuhan dan hewan, untuk keuntungan mereka sendiri.

Meski sering dituduh sebagai perusak lingkungan alam, perspektif antroposentrisme juga dianggap sebagai awal mula dari ide-ide yang menunjang perkembangan teknologi. Beberapa menganggap bahwa tanpa manusia, maka tidak akan ada yang memahami cara kerja dunia.

Hal tersebut merujuk pada bagaimana ilmuwan-ilmuwan mencoba mencari cara untuk menciptakan temuan baru demi mempermudah kelangsungan hidup kaumnya. Pada penciptaan mobil atau pesawat, ide tersebut muncul akibat keresahan manusia yang ingin berpindah ke tempat yang jauh dalam waktu singkat.

Sama halnya dengan pengambilan sumber daya alam seperti memetik buah atau berburu hewan. Kedua tindakan tersebut dilakukan karena keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Namun, cukup terhenti di sana. Antroposentrisme hanya berfokus bagaimana cara menaikkan taraf hidup manusia itu sendiri. Perspektif ini mengabaikan faktor alam yang juga bisa memengaruhi kehidupan manusia.

2.4.3 Asesmen

a. Identifikasi Masalah

1) Masalah

Dalam identifikasi masalah dan pengumpulan data, praktikan menggunakan metode wawancara pada saat melakukan home visit dan community involvement di masyarakat maupun kantor desa. Pihak yang diwawancarai, antara lain :

- a) Bapak Ganjar Selaku Ketua Karang Taruna di Desa Soreang pada tanggal 3 Maret 2023.
- b) Bapak Husni Abdullah selaku Anggota Karang Taruna di Desa Soreang pada tanggal 30 Maret 2023.
- c) Bapak Iyus Selaku Bidang Pelayanan Publik di Desa Soreang pada tanggal 30 Maret 2023.

Dari wawancara tersebut, didapatkan beberapa masalah terkait Pemeliharaan Irigasi di Desa Soreang, yaitu :

- a) Belum Adanya pemeliharaan irigasi yang baik;
- b) Banyak masyarakat yang membuang limbah rumah tangga atau sampah lainnya ke saluran irigasi;
- c) Menutup aliran irigasi dengan semen guna kepentingan pribadi.

2) Penyebab masalah

Penyebab yang menjadi masalah utama, yaitu belum adanya pemeliharaan irigasi yang baik di Desa Soreang, karena masih banyak pembuangan limbah atau sampah ke saluran irigasi bahkan penutupan irigasi oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a) Belum ada penataan lingkungan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam pemeliharaan Irigasi.
- b) Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya memelihara irigasi dan juga sifat antroposentrisme.

3) Dampak Masalah

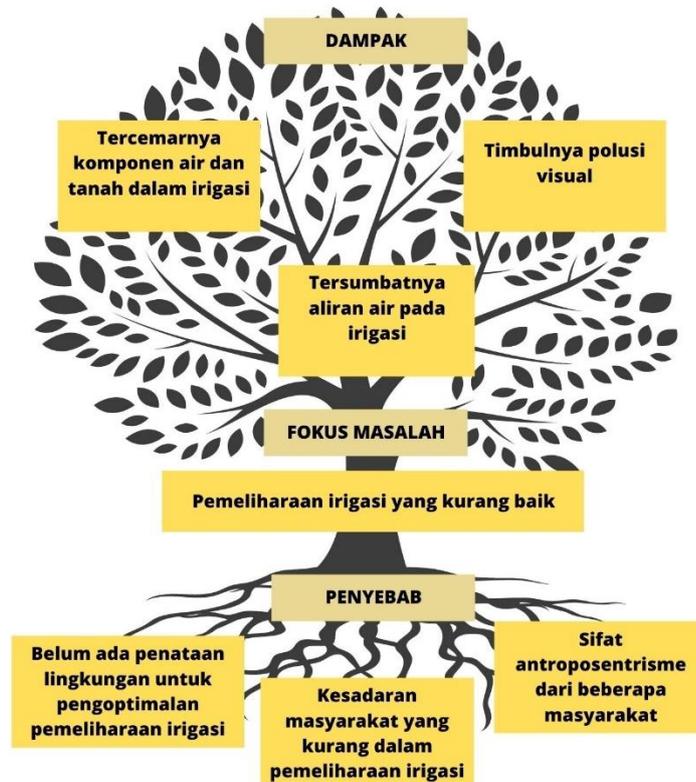
Masalah yang ditimbulkan dari penyebab-penyebab di atas, tentunya memiliki dampak bagi Irigasi dan komponen yang ada di dalamnya, dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :

- a) Tercemarnya komponen air dan tanah dalam irigasi;
- b) Timbulnya polusi visual akibat irigasi yang kotor;
- c) Tersumbatnya aliran irigasi berpotensi banjir.

4) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan praktikan dengan berbagai sumber, bahwa masalah utama irigasi yang ada di Desa Soreang adalah belum adanya pemeliharaan irigasi yang baik, sehingga menimbulkan beberapa dampak.

Agar lebih mudah memahami mengenai fokus masalah yang akan dikaji, praktikan mengilustrasikannya dengan alat bantu masalah, yaitu pohon masalah sebagai berikut :



Gambar 2.5 Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab-penyebab yang menjadi faktor terjadinya permasalahan, yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam bagian daun.

Penjelasan :

Fokus masalah berupa pemeliharaan irigasi yang kurang baik di Desa Soreang, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang membuang limbah rumah tangga atau sampah lainnya pada irigasi. Selain itu juga, terdapat beberapa aliran yang ditutup oleh masyarakat. Penutupan aliran tersebut dikarenakan oleh irigasi yang mampet dan penuh sampah sehingga memilih untuk menutup, lalu ada juga yang untuk keperluan perluasan lahan. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran dalam diri masyarakat untuk memelihara irigasi masih sangat rendah dan juga membuktikan adanya sifat antroposentrisme, di mana manusia sering melakukan suatu hal demi kepentingan atau keperluan pribadi tanpa memperdulikan lingkungan sekitar.

Di lain sisi, penyebab terjadinya fokus masalah di atas adalah belum adanya penataan lingkungan untuk pengoptimalan pemeliharaan irigasi yang baik. Di mana penataan lingkungan tersebut dapat menjadi himbuan kepada masyarakat untuk sadar akan pentingnya menjaga dan memelihara irigasi.

Masalah tersebut, tentunya memiliki dampak yang akan dialami oleh masyarakat dan lingkungannya, seperti tercemarnya komponen air dan tanah yang ada di dalam irigasi. Kebiasaan masyarakat yang sering membuang limbah rumah tangga dan sampah lainnya ke dalam irigasi, tentu saja akan mencemari komponen air dan tanah, di mana bakteri-bakteri atau kotoran yang ada pada sampah tersebut akan membuat air dan tanah pada irigasi menjadi kumuh. Lalu dengan adanya penumpukan sampah dan penutupan irigasi oleh masyarakat tersebut maka aliran air akan tersumbat dan menguap, hal tersebut tentu akan beresiko banjir apabila dibarengi dengan intensitas hujan yang tinggi. Dampak lainnya adalah timbulnya polusi visual akibat dari irigasi yang kumuh.

b. Identifikasi Kebutuhan

Melihat dari penyebab masalah yang sudah dijelaskan di atas, bahwa belum adanya penataan lingkungan guna mengoptimalkan pemeliharaan irigasi oleh masyarakat.

Maka yang Desa Soreang butuhkan untuk pemeliharaan irigasi adalah kegiatan penataan lingkungan berupa pemasangan saringan air di aliran irigasi agar sampah bisa tersaring dan aliran air menjadi bersih, dan juga pembersihan serta penghiasan irigasi, agar masyarakat segan untuk membuang sampah atau limbah rumah tangga pada irigasi. Selain itu, pembersihan dan penghiasan irigasi ini diharapkan bisa menjadi contoh masyarakat untuk bersama-sama membersihkan dan menghias irigasi di setiap RW-nya.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Sistem sumber informal

Bentuk dari sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu dukungan dan pemberian motivasi oleh rekan, keluarga, dan juga masyarakat.

2) Sistem sumber formal

Bentuk dari sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu pemerintahan Desa Soreang.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini, yaitu para PSKS yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna Desa Soreang dan para Fasilitator Desa Soreang.

2.4.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Tujuan dari pembangunan jaringan irigasi adalah :

- 1) Air yang tersedia dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- 2) Air yang tersedia dibagi secara adil dan merata.
- 3) Air yang diberikan ke petak-petak tersier secara tepat cara, waktu dan jumlah, sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman.
- 4) Akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air berlebihan dapat dihindari.

Sedangkan manfaat dari jaringan irigasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melancarkan aliran air ke lahan persawahan.
- 2) Menyuburkan/meningkatkan kesuburan tanah.
- 3) Sebagai tempat budidaya tumbuhan.
- 4) Pengatur suhu dalam tanah.

Dilihat dari tujuan dan manfaatnya, jaringan irigasi memiliki kontribusi yang cukup baik dalam penyediaan air, khususnya untuk budidaya tumbuhan dan kesuburan tanah. Selain itu, irigasi juga berfungsi untuk manajemen air berlebih dalam suatu daerah karena tingginya intensitas hujan.

Namun, jaringan irigasi di daerah irigasi Desa Soreang, kurang dirasakan manfaatnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi irigasi yang sudah tercemar limbah rumah tangga dan juga sampah lainnya. Sehingga komponen air dan tanah yang ada di alamnya ikut tercemar. Selain itu, terdapat beberapa jaringan irigasi yang bahkan ditutup oleh beberapa masyarakat untuk kepentingan pribadi. Kegiatan manusia tersebut tentu sangat berdampak bagi kelangsungan fungsi irigasi. Seperti kualitas air dan tanah yang rendah sehingga menghambat budidaya tumbuhan, lalu terganggunya manajemen air berlebih karena terganggunya aliran air akibat sampah yang menumpuk, serta timbulnya polusi visual yang sangat mengganggu.

Oleh karena itu, perlu adanya penataan lingkungan berupa pengelolaan irigasi yang baik. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, Pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi. Selain diperlukan pengelolaan irigasi, diperlukan juga pemeliharaan jaringan irigasi. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan jenisnya pemeliharaan dapat di bagi menjadi :

- 1) Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
- 2) Pemeliharaan rutin yaitu kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa danya konstruksi yang di ubah atau di ganti. Pemerlihaaraan rutin meliputi :
 - a) Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran.
 - b) Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak.

- c) Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan.
 - d) Pemeliharaan bangunan air (pembersihan, pelumasan dan pengecatan).
- 3) Pemeliharaan berkala yaitu kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan. Pemeliharaan berkala meliputi :
- a) Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran;
 - b) Pengecatan pintu;
 - c) Perbaikan Bendung, Bangunan Pengambilan dan Bangunan Pengatur;
 - d) Perbaikan Bangunan Ukur dan Kelengkapannya;
 - e) Pemeliharaan jalan inspeksi dan jalan usaha tani;
 - f) Perbaikan saluran, pintu air;
 - g) Perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan peralatan;
 - h) Penggantian pintu, alat ukur dll.

Dari penjelasan di atas, maka praktikan tertarik untuk membuat rencana intervensi terkait penataan lingkungan berupa pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah irigasi Desa Soreang guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus, serta memperbaiki hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya.

b. Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum yang ingin dicapai, yaitu peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah irigasi Desa Soreang.

2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan contoh mengenai hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungannya.
- b) Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan kegunaan pemeliharaan irigasi.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan gunanya lingkungan yang indah dan bersih.
- d) Menanamkan sifat peduli pada lingkungan kepada masyarakat.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang akan dilaksanakan, yaitu penataan lingkungan berupa pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah irigasi Desa Soreang guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.

Nama programnya, yaitu "masyarakat peduli lingkungan" Kegiatan dalam program ini akan meliputi pembersihan serta Pemasangan saringan pada jaringan irigasi dan juga penghiasan irigasi. Berikut adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini :

Tabel 2.23 Bentuk kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana Kegiatan
1	Pembersihan jaringan irigasi	Irigasi menjadi bersih	Karang Taruna bersama masyarakat
2	Pemasangan saringan pada jaringan irigasi	Sampah bisa tersaring dan aliran air tidak tersumbat	Karang Taruna
3	Penghiasan irigasi berupa pengecatan dan pemberian tanaman disekitar jaringan irigasi	Irigasi menjadi indah dan polusi visual bisa hilang	Karang Taruna bersama masyarakat

Sumber : Praktikan Tahun 2023

d. Sistem Partisipan

Tabel 2.24 Sistem Partisipan

System	Definition	System Representative
Initiator	Orang yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah pemeliharaan irigasi	Karang Taruna
Agent of change	Pekerja Sosial profesional, lembaga, atau yang lainnya, yang mengkoordinasikan usaha	Pekerja Sosial (Praktikan) dan karang taruna

	perubahan/pemecahan masalah	
Client	Penerima manfaat primer dan sekunder	Jaringan irigasi dan masyarakat
Support	Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan dalam pemecahan masalah.	Pemerintahan Desa dan masyarakat
Controlling	Orang atau orang2 yang mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	Pemerintahan desa dan jajarannya
Host	Bagian dari organisasi atau masyarakat yang memberikan naungan secara administrasi dalam intervensi	Karang taruna
Implementing	Staf atau voluntir yang melaksanakan intervensi	Pekerja sosial dan seorang initiator
Target	Pihak-pihak yang harus dirubah agar intervensi dapat berhasil	Masyarakat
Action	Orang yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yg bertanggung jawab mengawal upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas.	Inisiator, agen perubahan, dan voluntir.

Sumber : Praktikan 2023

e. Metode dan Teknik

1) Metode *Community Organization Community Development* (COCD)

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu.

(Arthur Dunham, 1958). *Community Work* adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Alan Twevetrees, 1993).

2) Teknik Penyuluhan dan Fasilitasi

a) Rehabilitasi dan Restorasi Lingkungan

Rehabilitasi yaitu memulihkan yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi, manfaat, dan nilai lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lahan, melindungi, serta memperbaiki ekosistem yang ada.

Sementara Restorasi yaitu usaha untuk memulihkan demi mengembalikan fungsi awal lingkungan hidup.

b) Fasilitasi

Fasilitasi merupakan teknik untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitatornya merupakan pekerja sosial atau praktikan.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Table 2.25 RAB

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Administrasi				
	Proposal pengajuan	50	Lembar	500	25.000
	Surat Menyurat	20	Lembar	500	10.000
	Jumlah 1				35.000
2	Logistik				
	Spanduk 4x2	1	Buah	100.000	100.000
	Alat Penyaring	4	Buah	50.000	200.000
	Cat	2	Kaleng	50.000	100.000
	Jumlah 2				100.000
3	Honorarium Narasumber Kegiatan Penyuluhan				
	Dinas Sosial Kabupaten Bandung	2	Orang	500.000	1.000.000
	Jumlah 3				1.000.000
4	Konsumsi				
	Snack Kelompok kerja	30	Orang	10.000	300.000

	Makan Kelompok Kerja	30	Orang	20.000	600.000
	Air Mineral	2	Dus	15.000	30.000
Jumlah 4					600.000
Jumlah Keseluruhan : 1.755.000					

Adapun alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan program, yaitu sebagai berikut :

Table 2.26 Alat yang diperlukan

No	Alat	Jumlah	Satuan
1	Cangkul	1	Buah
2	Clurit	2	Buah
3	Trash Bag	1	Buah
4	Kuas Cat	5	Buah
5	Sarung Tangan	30	Pasang
6	Spanduk	1	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman di dalam program “ masyarakat peduli”.

UJI KELAYAKAN PROGRAM

Tabel 2.27 Uji Kelayakan Program

	Strength	Weakness
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya antusiasme dari Karang Taruna untuk melakukan kegiatan penataan lingkungan • Masyarakat dan Karang Taruna merasa program ini sangat dibutuhkan • Jaringan irigasi yang mudah diakses 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya empati dari masyarakat
EKSTERNAL		
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pihak desa • Desa soreang memiliki koordinasi yang baik antarlembaganya. • Memiliki banyak sistem sumber yang bisa digunakan khususnya sistem sumber kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak demi berjalannya kegiatan program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan sistem controlling untuk menghimbau masyarakat
Threats	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan terdapat masyarakat yang menolak kegiatan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan tenaga pemuda karang taruna dan masyarakat yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan sistem controlling • Pembentukan tim kerja yang beranggotakan pemuda karang taruna dan masyarakat yang bersedia

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Program “ Masyarakat Peduli Lingkungan ” layak untuk dijalankan, karena Strength (S) lebih besar daripada Weakness (W) dan Opportunity (O) lebih besar daripada Threats (T).

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistematis dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan.

Tabel 2.28 Jadwal dan langkah program

Langkah Kegiatan	Juli		
	Minggu Ke		
	1	2	3
5. Persiapan			
Membentuk Tim Kerja Masyarakat			
Melakukan rapat mengenai kegiatan dan jadwal kegiatan			
Membuat proposal kegiatan dan surat kegiatan			
Mengurus perizinan dan mengurus surat menyurat			
Menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan			
6. Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan			
Kerja bakti membersihkan irigasi oleh tim kerja			
7. Pemasangan filter irigasi			
Tim kerja memasang filter irigasi di beberapa jaringan irigasi khususnya RW 1 yang menjadi hulu irigasi			
8. Pengecatan Irigasi			
Tim kerja melakukan penghiasan di jaringan irigasi RW 1			
9. Pengakhiran			
Evaluasi dan monitoring			
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban			
Pembubara TKM			

Kegiatan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

1) **Persiapan**

- a) **Membentuk Tim Kerja Masyarakat**

TKM program “ Masyarakat Peduli Lingkungan ”, terdiri dari Pemuda Karang Taruna dan Beberapa Masyarakat, yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
- b) **Melakukan Rapat**

Rapat dilakukan untuk membahas mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja. Rapat ini diadakan di kantor desa. Adapun dalam rapat ini akan membahas terkait dengan siapa saja yang akan mengisi acara dan bagaimana agenda kegiatan, serta hal lain yang termasuk dalam konsep kegiatan.
- c) **Membuat proposal kegiatan dan surat**

Sekretaris dalam kepanitiaan akan diminta untuk membuat proposal sebagai bentuk perizinan program untuk Pemerintahan desa.
- d) **Perizinan dan surat menyurat**

Praktikan dan humas akan mengunjungi kantor desa dengan tujuan melakukan perizinan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu setelah itu akan memberikan surat kepada pihak karang taruna
- e) **Menyiapkan alat**

TKM akan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan program.

2) **Pelaksanaan**

- a) **Pelaksanaan Pembersihan Irigasi**

Sebelum dilakukan pemasangan filter dan penghiasan irigasi, TKM akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan genangan sampah, lumpur, serta kotoran lainnya.
- b) **Pemasangan Filter Irigasi**

Filter akan dipasang di beberapa jaringan irigasi, yang berfungsi untuk memfilter air dari sampah atau kotoran lainnya.
- c) **Penghiasan Irigasi**

Setelah irigasi bersih dan dipasang filter, maka selanjutnya akan dilakukan pengecatan dan penghiasan irigasi, khususnya irigasi di RW 1. Penghiasan ini bertujuan untuk memberikan contoh ke masyarakat yang lain agar dapat menjaga dan memelihara irigasi dengan baik. Selain itu, irigasi yang telah bersih dan memiliki visual yang baik, tidak akan dijadikan tempat pembuangan limbah.

3) Pengakhiran

a) Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam program ini dilakukan dengan pembuatan angket yang disebarakan kepada ex partisipan program beberapa hari setelah program dilaksanakan. Pembagian kuesioner dilakukan oleh humas, sama seperti pada saat membagikan surat undangan.

b) Pembuatan LPJ

Setelah kegiatan evaluasi selesai, selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada desa. Setelah semua tugas dan kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya, maka panitia dibubarkan.

2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana

2.5.1 Gambaran Masalah

Menurut BNPB, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Dari ketiga jenis bencana di atas, di Desa Soreang yang menjadi lokasi praktikum, bencana yang telah terjadi adalah bencana banjir yang diakibatkan oleh faktor manusia itu sendiri. Selain itu juga terdapat bencana non alam berupa kebakaran.

Desa Soreang juga masuk dalam desa yang berpotensi terkena gempa bumi dengan kelas bahaya tinggi. Oleh karena itu, melihat beberapa bencana yang telah terjadi dan juga berpotensi untuk terjadi, maka harus ada kesiapsagaan bencana.

Pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat harus memiliki keterampilan dalam menghadapi bencana, baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.

Namun, Sesa Soreang sendiri belum menjadi desa siaga bencana. Di mana mayoritas masyarakat belum memiliki keterampilan dalam menghadapi situasi bencana, pra bencana, dan juga pasca bencana. Sehingga masyarakat dinilai rentan dalam pengendalian bencana.

Seperti bencana banjir yang terjadi di Desa Soreang pada awal bulan Maret 2023. Banjir tersebut disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak bisa memelihara jaringan irigasi, yaitu dengan membuang limbah rumah tangga ke jaringan irigasi dan menutup jaringan irigasi untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut membuat aliran irigasi tersumbat, dan ketika hal tersebut dibarengi dengan curah hujan yang tinggi dan intens, maka berpotensi terjadinya banjir.

Dampak dari banjir tersebut, yaitu rumah-rumah warga yang tergenang air cukup tinggi hingga pada kerusakan rumah dan fasilitas umum lainnya.

Hal tersebut tentu membutuhkan pengendalian bencana banjir yang baik, dari pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Terlebih lagi, air yang menggenangi rumah-rumah warga tentu sudah terkontaminasi oleh vektor atau bakteri jahat lainnya. Maka salah satu keterampilan masyarakat pasca bencana banjir adalah mengenai pengendalian vektor.

2.5.2 Tinjauan Konsep

a. Konsep Bencana

1) Pengertian Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah sebagai berikut : Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Sedangkan definisi bencana (disaster) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian bencana diatas, bahwa pada dasarnya pengertian bencana secara umum yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana prasana maupun struktur sosial yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

2) Jenis Bencana

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

b. Konsep Banjir

1) Pengertian Banjir

Banjir di defenisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilaah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (IDEP,2007).

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir jua dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Ligak, 2008).

2) Penyebab Banjir

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti : perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistim pengendali banjir yang tidak tepat.

3) Dampak Banjir

Banjir menimbulkan kerugian secara material dan non material. Selain mengganggu aktifitas masyarakat juga menimbulkan masalah kesehatan. Banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan para korban, seperti:

a) Kesulitan air bersih

Keterbatasan air bersih pasti ditemukan dalam kondisi banjir begini, baik untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Air isi ulang sangat dibutuhkan untuk air minum dan mandi.

b) Menimbulkan kerugian ekonomi

Banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah, bahkan kehilangan barang-barang berharga lainnya. Selain itu, para korban juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Musibah ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat korban dari sisi ekonomi. Untuk beberapa daerah yang terdampak besar terhadap banjir ini akan berdampak juga kepada penghambatan laju perputaran roda ekonomi suatu daerah karena masyarakat setempat sangat bergantung dengan hasil alam di daerah tersebut.

c) Menimbulkan masalah kesehatan

Air kotor, kekurangan air bersih, dan banyaknya genangan air sudah dipastikan menimbulkan masalah kesehatan. Dan berikutnya akan menimbulkan penyebaran wabah penyakit. Penyakit yang timbul pada kawasan yang terkena banjir ini rentan menyerang anak-anak dan kaum lanjut usia. Hal ini terjadi karena Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) tidak dilaksanakan dengan baik dan benar seperti melakukan cuci tangan setelah kontak dengan air banjir (khususnya sebelum makan), tidak membiarkan anak-anak bermain dengan air banjir dan mainan yang sudah terkontaminasi air banjir. Di Indonesia, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang paling diwaspadai ketika musim hujan tiba atau pasca banjir. Sementara untuk penyakit yang disebabkan oleh binatang pengerat, leptospirosis merupakan penyakit yang paling banyak ditemui. Bakteri leptospira banyak ditemukan pada tikus. Penyebaran pada manusia terjadi bila urine tikus yang mengandung leptospira mengkontaminasi air dan makanan serta mengenai kulit manusia.

d) Melumpuhkan aktifitas masyarakat

Banjir yang cukup besar dapat menenggelamkan rumah penduduk dan mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pakaian seadanya dan tidak adanya tempat tinggal membuat masyarakat menjadi sulit untuk melakukan aktifitas seperti biasa. Bencana banjir juga membuat kesulitan dalam akses dan transportasi. Selain itu dapat merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat membantu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

e) Menimbulkan korban jiwa

Korban jiwa juga dapat ditemukan dalam kondisi bencana banjir. Baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Sangat memungkinkan hal itu terjadi jika banjir yang terjadi menimbulkan kerusakan permukiman masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, korban jiwa juga berasal dari korban banjir yang terkena penyakit seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun, tidak sedikit juga korban jiwa ini terjadi karena penggunaan listrik atau peralatan elektronik di rumah yang sedang banjir atau terkena sengatan listrik yang berasal dari tiang listrik yang tidak dipadamkan sebelumnya oleh PLN.

c. Konsep Manajemen Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Manajemen Penanggulangan

- a) Pencegahan (prevention) adalah “langkah-langkah untuk melakukan, menghilangkan atau mengurangi ancaman secara drastis melalui pengendalian dan pengaturan fisik dan lingkungan. Tindakan ini bertujuan untuk menekan sumber ancaman dengan mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan energi atau bahan ke daerah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih lama” (Smith, 1992:81).
- b) Mitigasi (mitigation) adalah “tindakan fokus pada perhatian untuk mengurangi dampak dari ancaman dan dengan demikian mengurangi negatif dampak bencana terhadap kehidupan melalui beberapa alternatif yang sesuai dengan ekologi. Kegiatan mitigasi mencakup tindakan non-rekayasa seperti peraturan, sanksi dan penghargaan untuk memaksa perilaku yang lebih cocok dan melalui informasi untuk meningkatkan kesadaran” (ADB. 1991:41).

- c) Kesiapan Tanggap Darurat (preparedness) adalah “prediksi tentang kebutuhan masa depan jika ada bencana keadaan darurat dan identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, dan dengan demikian membawa masyarakat di daerah bahaya untuk merespon yang lebih baik terhadap kesiapan menghadapi bencana. Berdasarkan pemahaman bahwa kehancuran dalam bencana tidak dapat dihindari, tanggap darurat menempatkan beberapa pengaturan secara efektif. Kesiapan tanggap darurat meliputi pengaturan dan pelatihan rencana tanggap darurat untuk mengatur, menyiapkan dan menguji sistem peringatan dini, penyimpanan dan kesiapan pasokan kebutuhan dasar, pelatihan dan simulasi, kesiapan mekanisme alarm dan prosedur tetap” (Flemming, 1957).
- d) Tanggap Darurat (response) adalah “tindakan sebelum dan setelah bencana. Tindakan dalam tahap ini seperti identifikasi lokasi bencana, studi cepat tentang kerusakan dan ketersediaan sumber daya untuk menentukan dengan cepat pemenuhan kebutuhannya. Seiring dengan itu, mungkin ada pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan pertama, evakuasi, tempat para pengungsi dan fasilitas, pengiriman pasokan darurat dan obat-obatan, sumber daya bergerak dan pemulihan fasilitator utama seperti komunikasi, transportasi, air, dan fasilitas publik lainnya” (BNPB, 2013).
- e) Pemulihan (recovery) adalah “tindakan yang bertujuan untuk membantu orang mendapatkan kembali apa yang sudah hilang dan membangun kembali kehidupan, dan untuk mendapatkan kembali peluang mereka. Semua ini akan dicapai melalui pembangun kembali dan memfungsikan kembali fasilitas-fasilitas, memulihkan tingkat kemampuan sosial ekonomi mereka sama atau lebih baik dari sebelum bencana bersama dengan penguatan ketahanan mereka untuk menghadapi bencana di masa mendatang “ (BNPB, 2013).

2) Tahapan Manajemen Penanggulangan

Manajemen Bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut (Hertanto, 2009):

- a) Pra Bencana
- Kesiapsiagaan adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna” (BNPB, 2013);
 - “Sistem Peringatan Dini Merupakan informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu. Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang berpotensi terkena bencana di tempat masing-masing” (BNPB, 2013);
 - “Mitigasi adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana” (BNPB, 2013).
- b) Saat Bencana
- Tanggap Darurat Bencana adalah “serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (damage and needs assessment), penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana” (Ramli, 2010);
 - “Penanggulangan bencana selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian” (Ramli, 2010).
- c) Pasca Bencana
- Rehabilitasi adalah “serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penanganan korban bencana yang mengalami trauma psikologis” (Ramli, 2010);
 - Rekonstruksi adalah “serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat”. Berorientasi pada pembangunan dengan tujuan mengurangi dampak bencana, dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat (Ramli, 2010);

- Prevensi adalah “serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik” (Ramli, 2010).

d. Konsep Vektor

Vektor adalah agen pembawa penyakit. Vektor menciptakan jalur dari sumber penyakit ke manusia. Penyakit yang ditularkan vektor adalah penyebab utama penyakit dan kematian di banyak situasi kemanusiaan.

Beberapa sumber lain, menyebutkan vektor penyakit adalah serangga atau organisme hidup lain pembawa agen infeksius dari suatu individu terinfeksi ke individu rentan (Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, 2012).

Definisi lebih luas tentang vektor penyakit menurut Institute of Medicine (US) Forum on Microbial Threats (2008) adalah pembawa dan penular agen/patogen penyakit.

Definisi yang lebih spesifik menurut Rozendaal (1997) dan Awoke et al. (2006), vektor adalah artropoda atau invertebrata lain yang berpotensi menularkan patogen dengan melakukan inokulasi ke dalam tubuh melalui kulit atau membran mukosa, melalui gigitan, atau meletakkan material infeksius pada kulit, makanan, atau obyek lain.

Rangkuman definisi vektor dari beberapa pengertian tersebut, vektor penyakit merupakan artropoda atau avertebrata (seperti keong) bertindak sebagai penular penyebab penyakit (agen) dari hospes pejamu sakit ke rentan pejamu lain.

Kebanyakan vektor adalah serangga seperti nyamuk, lalat dan kutu, namun hewan pengerat juga bisa menjadi vektor. Beberapa vektor juga bisa menyebabkan gigitan menyakitkan.

Vektor dapat berupa gejala masalah pengelolaan limbah padat, saluran limbah atau tinja, pemilihan lokasi yang tidak sesuai, atau masalah keselamatan dan keamanan yang lebih luas. Penyakit yang ditularkan melalui vektor dapat menjadi rumit, dan memecahkan masalah terkait vektor mungkin memerlukan saran spesialis. Namun, tindakan sederhana dan efektif dapat mencegah penyebaran penyakit semacam itu.

e. Konsep Pengendalian Vektor

Peraturan Menteri Kesehatan No. 374 Tahun 2010 mengartikan pengendalian vektor sebagai kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit yang dibawa oleh vektor dapat dicegah.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam pengendalian penyakit menular adalah dengan pengendalian vektor (serangga penular penyakit) untuk memutuskan rantai penularan penyakit. Faktor yang penting dalam pengendalian vektor adalah mengetahui bionomik vektor, yaitu tempat perkembangbiakan, tempat istirahat, serta tempat kontak vektor dan manusia.

Upaya pengendalian vektor dengan menggunakan bahan kimia ternyata tidak cukup aman, karena walaupun dapat menurunkan populasi vektor dengan segera, penggunaan bahan kimia yang berlebihan juga mempunyai dampak yang merugikan terhadap lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Selain menggunakan bahan kimia, pengendalian vektor juga bisa dilakukan dengan pengubahan lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pengubahan lingkungan fisik dilakukan agar vektor tidak dapat berkembangbiak, istirahat, ataupun menggigit. Misalnya dengan Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN) untuk pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terkenal dengan sebutan 3M yaitu Menguras Tempat Penampungan Air (TPA), Menutup TPA dan Menimbun barang-barang yang dapat menampung air hujan yang bisa menjadi tempat berkembangbiak nyamuk *Aedes aegypti*. Contoh lain yaitu dengan membersihkan saluran air menggenang yang dapat menjadi tempat berkembangbiak nyamuk penular penyakit kaki gajah (filariasis).

Pengubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yaitu dengan mengubah perilaku masyarakat agar tidak terjadi kontak antara manusia dan vektor, misalkan dengan memasang kawat kasa pada ventilasi rumah agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, atau memakai kelambu untuk mencegah gigitan nyamuk. Selama ini sebenarnya sebagian masyarakat sudah mengetahui cara pengendalian vektor penyakit dengan pengubahan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

Namun demikian perlu kiranya peningkatan upaya-upaya tersebut agar pengendalian vektor sebagai salah satu cara pengendalian penyakit menular dapat berhasil dengan baik.

Untuk itu diperlukan adanya kerjasama dari berbagai sektor terkait agar peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian vektor ini dapat berjalan dengan baik, sehingga mengurangi resiko terjadinya penularan penyakit di masyarakat.

1) Pengendalian Tingkat Pemukiman

Warga yang tinggal di lingkungan pembibitan vektor dan tempat makan disasar untuk mengurangi risiko masalah terkait vektor.

Pemilihan lokasi penting untuk meminimalkan paparan penduduk yang terkena dampak terhadap risiko penyakit yang ditularkan vektor. Ini harus menjadi salah satu faktor kunci ketika mempertimbangkan kemungkinan situs. Untuk mengendalikan malaria, misalnya, cari permukiman warga 1–2 kilometer dari tempat pembiakan besar seperti rawa atau danau, tetapi pastikan ketersediaan sumber air bersih tambahan. Pertimbangkan dampak situs permukiman baru dapat memiliki keberadaan vektor.

2) **Pengendalian Tingkat Rumah Tangga dan Pribadi**

Semua orang yang terkena dampak memiliki pengetahuan dan sarana untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka dari vektor yang dapat menyebabkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan atau kesejahteraan.

Higiene pribadi yang baik dan mencuci pakaian serta alas tidur secara teratur adalah perlindungan paling efektif terhadap kutu tubuh. Mengontrol infestasi dengan perawatan pribadi (pembedahan), pencucian massal atau kampanye yang mengganggu. Kembangkan dan gunakan protokol pengobatan untuk pendatang baru di permukiman. Lingkungan rumah tangga yang bersih, pembuangan limbah yang efektif dan penyimpanan makanan yang dimasak dan tidak dimasak dengan benar akan mencegah tikus, hewan pengerat dan serangga lainnya (seperti kecoak) memasuki rumah.

2.5.3 **Asesmen**

a. **Identifikasi Masalah**

1) **Masalah**

Dalam identifikasi masalah dan pengumpulan data, praktikan menggunakan metode wawancara pada saat melakukan home visit dan community involvement di masyarakat maupun kantor desa. Pihak yang diwawancarai, antara lain :

- a) Pak Iyus selaku bidang Pelayanan Publik di Kantor Desa Soreang pada tanggal 23 Februari 2023.

Dari wawancara tersebut, didapatkan beberapa masalah terkait Pengendalian Vektor sebagai upaya manajemen bencana pasca banjir, sebagai berikut :

- a) Pengendalian vektor tingkat pemukiman belum menyeluruh.

2) Penyebab Masalah

Masalah-masalah yang terjadi terkait pengendalian vektor di atas, tentu muncul karena suatu penyebab, berikut adalah penyebab masalahnya :

- a) Pengendalian vektor tingkat pemukiman hanya bisa dilakukan di RW 1 yang memiliki ketersediaan air berlebih.

3) Dampak dari Masalah

Dari permasalahan mengenai pengendalian vektor yang belum menyeluruh, pasti memiliki dampak pada tiap-tiap rumah tangga maupun pribadi yang terdampak banjir, namun belum mendapatkan pengendalian vektor pada tingkat pemukiman, berikut adalah penjelasan terkait dampak masalahnya :

- a) Beresiko munculnya penyakit-penyakit menular;
- b) Ancaman bagi kesehatan masyarakat;
- c) Tidak adanya kesiapan dalam manajemen pasca bencana banjir.

4) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil wawancara terkait masalah, penyebab, dan dampak yang terjadi terkait pengendalian vektor. Praktikan menyimpulkan bahwa masalah utama yang nampak, yaitu pengendalian vektor tingkat pemukiman yang belum menyeluruh, karena keterbatasan sumber air yang dapat digunakan, sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat, khususnya resiko terkena penyakit menular. Berikut merupakan analisis masalah menggunakan pohon masalah :



Gambar 2.6 Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab-penyebab yang menjadi faktor terjadinya permasalahan, yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam bagian daun.

Penjelasan :

Manajemen bencana, memiliki beberapa tahapan, yaitu pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Kegiatan pengendalian vektor, merupakan salah satu rangkaian usaha dalam recovery pasca bencana, dalam hal ini bencana banjir.

Namun, di Desa Soreang sendiri, pengendalian vektor pada tingkat pemukiman, hanya ada di RW 1 saja, sedangkan ada 6 sampai 7 RW yang terkena dampak banjir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengendalian vektor pada tingkat pemukiman di Desa Soreang belum menyeluruh.

Hal tersebut disebabkan oleh, ketersediaan air berlebih yang tidak dimiliki oleh semua RW yang terdampak banjir. Selain itu, dalam kegiatan pengendalian vektor, memiliki beberapa indikator kunci yang harus diperhatikan, seperti memperhatikan faktor keterpaparan masyarakat akibat dari kegiatan pengendalian vektor tingkat pemukiman, menentukan apakah pengendalian kimiawi atau non-kimiawi dari vektor di luar rumah tangga relevan berdasarkan pemahaman tentang siklus kehidupan vektor, menginformasikan penduduk tentang potensi risiko yang berasal dari pengendalian kimiawi vektor dan tentang jadwal untuk penggunaan bahan kimiawi, mengukur respon lingkungan yang akan terjadi, melatih dan melengkapi semua personel yang menangani bahan kimia dengan alat pelindung diri (APD) dan pakaian, dan lain sebagainya.

Karena pengendalian vektor tingkat pemukiman belum menyeluruh, sehingga masih terdapat sebagian pemukiman yang terdampak banjir, namun belum tercover oleh pengendalian vektor tingkat pemukiman, maka hal tersebut dapat berdampak pada resiko kesehatan masyarakat, seperti beresiko terkena penyakit menular, dan kondisi pemukiman rumah tangga yang kurang sehat.

b. Identifikasi Kebutuhan

Melihat dari permasalahan yang ada, bahwa kegiatan manajemen bencana pada tahap pasca bencana, yaitu pengendalian vektor tingkat pemukiman pasca bencana banjir yang belum menyeluruh, karena disebabkan oleh keterbatasan air dan juga tidak terpenuhinya indikator-indikator kunci yang harus dilakukan.

Maka untuk manajemen usaha tahap pasca bencana banjir yang ada di Desa Soreang, memerlukan pengendalian vektor pada tingkat yang lebih rendah, yaitu tingkat rumah tangga atau pribadi, sehingga Semua orang yang terkena dampak memiliki pengetahuan dan sarana untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka dari vektor yang dapat menyebabkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan atau kesejahteraan.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Sistem sumber informal

Bentuk dari sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu dukungan dan pemberian motivasi oleh rekan ataupun keluarga sehingga bisa memiliki semangat dalam proses recovery pasca bencana.

2) Sistem sumber formal

Bentuk dari sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu pemerintahan Desa Soreang itu sendiri, yang harus memberikan layanan dan dukungan penuh pada seluruh anggota masyarakatnya.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada di Kabupaten Bandung.

2.5.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Beberapa wilayah di Desa Soreang, seperti wilayah RW 2,3,4,5,7, dan 8, merupakan wilayah yang rawan banjir. Hal tersebut dibuktikan dengan peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Maret yang melanda 5 RW dengan jumlah yang terdampak, yaitu 103 KK. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya jaringan irigasi, karena tertutup oleh sampah dan pembangunan.

Peristiwa banjir tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas umum, bangunan rumah, ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, sampai pada penyebaran vektor yang dapat mengancam kesehatan masyarakat karena penyakit menular.

Penyakit tular vektor merupakan penyakit yang menular melalui hewan perantara (vektor).

Sehingga dalam kegiatan rekonstruksi pasca bencana banjir, harus ada kegiatan pengendalian vektor.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 374 Tahun 2010 mengartikan pengendalian vektor sebagai kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit yang dibawa oleh vektor dapat dicegah.

Menurut (Sphere, 2018), terdapat dua tingkatan pengendalian vektor, yaitu pengendalian tingkat pemukiman dan pengendalian tingkat rumah tangga atau pribadi.

Di Desa Soreang sendiri sebenarnya sudah ada pengendalian vektor pada tingkat pemukiman, hanya saja belum menyeluruh, Hal tersebut disebabkan oleh, ketersediaan air berlebih yang tidak dimiliki oleh semua RW yang terdampak banjir. Selain itu, dalam kegiatan pengendalian vektor, memiliki beberapa indikator kunci yang harus diperhatikan, seperti memperhatikan faktor keterpaparan masyarakat akibat dari kegiatan pengendalian vektor tingkat pemukiman, menentukan apakah pengendalian kimiawi atau non-kimiawi dari vektor di luar rumah tangga relevan berdasarkan pemahaman tentang siklus kehidupan vektor, menginformasikan penduduk tentang potensi risiko yang berasal dari pengendalian kimiawi vektor dan tentang jadwal untuk penggunaan bahan kimiawi, mengukur respon lingkungan yang akan terjadi, melatih dan melengkapi semua personel yang menangani bahan kimia dengan alat pelindung diri (APD) dan pakaian, dan lain sebagainya.

Karena pengendalian vektor tingkat pemukiman belum menyeluruh, sehingga masih terdapat sebagian pemukiman yang terdampak banjir, namun belum tercover oleh pengendalian vektor tingkat pemukiman, maka hal tersebut dapat berdampak pada resiko kesehatan masyarakat, seperti beresiko terkena penyakit menular, dan kondisi pemukiman rumah tangga yang kurang sehat.

Oleh karena itu untuk manajemen bencana tahap pasca bencana banjir yang ada di Desa Soreang, memerlukan pengendalian vektor pada tingkat yang lebih rendah, yaitu tingkat rumah tangga dan pribadi, sehingga Semua orang yang terkena dampak memiliki pengetahuan dan sarana untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka dari vektor yang dapat menyebabkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan atau kesejahteraan.

Dalam hal ini, praktikan tertarik untuk menyusun rencana intervensi terkait pemberian keterampilan dalam pengendalian vektor pada tingkat rumah tangga dan pribadi sebagai bekal keterampilan rekonstruksi pasca bencana banjir.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum yang ingin dicapai, yaitu Meningkatkan Keterampilan dalam pengendalian vektor tingkat rumah tangga dan pribadi.

2) Tujuan Khusus

- a) Semua orang yang terkena dampak memiliki pengetahuan dan sarana untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka dari vektor yang dapat menyebabkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan atau kesejahteraan.
- b) Menurunkan populasi vektor serendah mungkin secepatnya sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor.
- c) Menjaga masyarakat dari risiko penyakit menular yang bisa mengganggu kesehatan.
- d) Menciptakan lingkungan yang sehat.
- e) Sebagai Mitigasi untuk mengurangi risiko penyakit akibat dari bencana banjir.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang akan dilaksanakan, yaitu terkait pengedukasian dan pemberian keterampilan melalui “Pengendalian Vektor Terpadu (PVT)” .

PVT ini merupakan suatu pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan, rasionalitas, dan efektifitas pelaksanaannya, serta dengan mempertimbangkan kesinambungannya. Di mana pengedukasian akan didasarkan pada tiap-tiap rumah tangga yang berada pada daerah rawan banjir.

Selain pengedukasian, program ini juga akan memberikan fasilitasi berupa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengendalian vektor pada tingkat rumah tangga dan pribadi.

Tabel 2.29 Bentuk Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksana Kegiatan
1	Penyuluhan dan diskusi tentang Pengendalian Vektor Terpadu	Masyarakat yang menjadi sasaran memiliki pengetahuan terkait pengendalian vektor	BPBD

2	Pemberian Keterampilan, melalui uji coba pengendalian vektor di lokasi yang telah ditentukan	Masyarakat yang menjadi sasaran memiliki keterampilan dalam pengendalian vektor	BPBD
3	Pemberian fasilitas untuk pengendalian vektor pada tingkat rumah tangga dan pribadi	Masyarakat memiliki fasilitas untuk pengendalian vektor	BPBD dan Pemerintah Desa

Sumber : *Praktikan Tahun 2023*

d. Sistem Partisipasi

Tabel 2.30 Sistem Partisipan

System	Definition	System Representati ve
Initiator	Orang yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah pengendalian vektor	Praktikan selaku Pekerja Sosial
Agent of change	Pekerja Sosial profesional, lembaga, atau yang lainnya, yang mengkoordinasikan usaha perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial (Praktikan) dan BPBD
Client	Penerima manfaat primer dan sekunder	Masyarakat yang berada pada daerah rawan banjir
Support	Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan dalam pemecahan masalah.	Pemerintah Desa Soreang
Controlling	Orang atau orang2 yang mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	Pemerintahan Desa Soreang beserta jajarannya

Host	Bagian dari organisasi atau masyarakat yang memberikan naungan secara administrasi dalam intervensi	Tiap-tiap ketua RW
Implementing	Staf atau voluntir yang melaksanakan intervensi	Pekerja sosial dan seorang initiator
Target	Pihak-pihak yang harus dirubah agar intervensi dapat berhasil	Masyarakat yang berada pada daerah rawan banjir
Action	Orang yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yg bertanggung jawab mengawal upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas.	Inisiator, agen perubahan, dan voluntir.

Sumber : *Praktikan Tahun 2023*

e. Metode dan Teknik

1) Metode *Community Organization Community Development* (COCD)

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958).

Community Work adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Alan Twevetrees, 1993).

2) Teknik Penyuluhan dan Fasilitasi

a) Penyuluhan

Penyuluhan, yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Penyuluhan dilakukan dengan menyebarkan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya.

Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

b) Fasilitasi

Fasilitasi merupakan teknik untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitatornya merupakan pekerja sosial atau praktikan.

c) *Capacity Building*

Merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini kemampuan yang ditingkatkan yaitu kemampuan Karang Taruna dalam mengelola atau menyelenggarakan PUB dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

f. **RAB dan Alat yang dibutuhkan**

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.31 RAB

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Administrasi				
	Proposal pengajuan	50	Lembar	500	25.000
	Surat Undangan	100	Lembar	500	50.000
	Pamflet Materi	100	Lembar	1.000	100.000
Jumlah 1					175.000
2	Logistik				
	Spanduk 4x2	1	Buah	100.000	100.000
Jumlah 2					100.000
3	Honorarium Narasumber Kegiatan Penyuluhan				
	BPBD Kabupaten Bandung	2	Orang	500.000	1.000.000
Jumlah 3					1.000.000
4	Konsumsi				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000

	Snack Peserta	100	Orang	10.000	1000.000
	Snack TKM	10	Orang	10.000	100.000
	Snack Perwakilan Pemerintah Desa	5	Orang	10.000	50.000
	Makan Siang Narasumber	2	Orang	25.000	50.000
	Makan TKM	10	Orang	25.000	250.000
	Makan Perwakilan Desa	5	Orang	25.000	125.000
	Air Mineral	5	Dus	15.000	75.000
Jumlah 4					1.650.000
Jumlah Keseluruhan : 2.925.000					

Sumber : Praktikan Tahun 2023

Adapun alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan program, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.32 Alat yang diperlukan

No	Alat	Jumlah	Satuan
1	Sound System	1	Buah
2	Michrophone	2	Buah
3	Proyektor	1	Buah
4	Laptop	2	Buah
5	Kabel Roll	3	Buah
6	Banner	1	Buah
7	Meja	4	Buah
8	Kursi	200	Buah
9	Taplak Meja	4	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman di dalam program “Pengendalian Vektor Terpadu (PVT)”.

UJI KELAYAKAN PROGRAM

Table 2.33 Uji Kelayakan Program

	Strength	Weakness
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini dinilai sangat penting dan sangat diperlukan • Masyarakat selalu antusias dalam mempelajari hal baru • Program ini bisa menjadi mitigasi untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit akibat dari bencana banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan dari tiap-tiap rumah tangga dan pribadi terkait PVT
EKSTERNAL		
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari Pemerintah Desa Soreang • Desa soreang memiliki koordinasi yang baik antarlembaganya. • Memiliki banyak sistem sumber yang bisa digunakan khususnya sistem sumber kemasyarakatan, yaitu BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak demi berjalannya kegiatan program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengetahuan mengenai PVT • Memberikan bekal keterampilan dan fasilitasi alat dan bahan yang diperlukan untuk PVT
Threats	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Ini merupakan kegiatan PVT tingkat rumah tangga dan pribadi pertama yang dilakukan, sehingga berpotensi terjadinya <i>trial and error</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan antusias masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan edukasi dan capacity building terkait PVT 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan edukasi dan keterampilan kepada masyarakat terkait PVT

Sumber : Praktikan Tahun 2023

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Program “ Penanggulangan Vektor Terpadu (PVT)” layak untuk dijalankan, karena Strength (S) lebih besar daripada Weakness (W) dan Opportunity (O) lebih besar daripada Threats (T).

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistematis dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan.

Table 2.34 Jadwal dan langkah program

Langkah Kegiatan	April			
	Minggu Ke			
	1	2	3	4
10. Persiapan				
Membentuk Tim Kerja Masyarakat				
Melakukan rapat mengenai kegiatan dan jadwal kegiatan				
Membuat proposal kegiatan dan undangan				
Mengurus perizinan dan menyebarkan undangan				
Menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan				
11. Pelaksanaan Penyuluhan				
Penyuluhan dan diskusi tentang PVT				
Pemberian Keterampilan mengenai PVT				
12. Fasilitasi				
Pendistribusian fasilitas untuk PVT pada tingkat rumah tangga dan pribadi				
13. Pengakhiran				
Evaluasi dan monitoring				
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban				
Pembubara TKM				

Kegiatan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

1) Persiapan

- a) Membentuk Tim Kerja Masyarakat
TKM program “ Pengendalian Vektor Terpadu (PVT)”, terdiri dari praktikan selaku Pekerja Sosial dan juga pemuda Karang Taruna, yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
- b) Melakukan Rapat
Rapat dilakukan untuk membahas mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja. Rapat ini diadakan di kantor desa. Adapun dalam rapat ini akan membahas terkait dengan siapa saja yang akan mengisi acara dan bagaimana agenda kegiatan, serta hal lain yang termasuk dalam konsep kegiatan.
- c) Membuat proposal kegiatan dan undangan
Sekretaris dalam kepanitiaan akan diminta untuk membuat proposal sebagai bentuk perizinan program serta undangan untuk Perwakilan desa, narasumber, dan tiap-tiap RW yang menjadi sasaran program.
- d) Perizinan dan menyebarkan undangan
Praktikan dan humas akan mengunjungi kantor desa dengan tujuan melakukan perizinan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu setelah itu akan menyebarkan undangan ke sasaran program.
- e) Menyiapkan alat
TKM akan menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan program.

2) Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan Sosialisasi
Rundown pelaksanaan kegiatan yang berisi agenda pelaksanaan program terlampir.
- b) Pelaksanaan fasilitasi
Setelah kegiatan sosialisasi, Pekerja sosial bekerjasama dengan pemerintahan Desa Soreang dibantu oleh TKM, mendistribusikan fasilitas untuk keperluan PVT.

3) Pengakhiran

- a) Evaluasi kegiatan
Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam program ini dilakukan dengan pembuatan angket yang disebarkan kepada ex partisipan program beberapa hari setelah program dilaksanakan. Pembagian kuesioner dilakukan oleh humas, sama seperti pada saat membagikan surat undangan.

b) Pembuatan LPJ

Setelah kegiatan evaluasi selesai, selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada desa. Setelah semua tugas dan kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya, maka panitia dibubarkan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Kegiatan praktikum laboratorium sangat bermanfaat untuk praktikan dalam mengembangkan teknik-teknik yang sudah dipelajari sebelumnya. Disini praktikan dapat menerapkan tahap-tahap intervensi komunitas dari inisiasi sosial sampai dengan perencanaan intervensi serta dapat menggunakan teknik *community involvement*, *transect walk*, wawancara, *home visit* dan *community informal meeting*. Hal ini menjadi pengalaman berharga bagi praktikan dalam berinteraksi dengan stakeholder maupun masyarakat dan sebagai modal kedepannya.

Dari kegiatan praktikum ini, praktikan mendapatkan keterampilan dalam menganalisis isu-isu yang ada pada masyarakat, khususnya isu-isu yang relevan dengan Profil Lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, yang terdiri dari Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Serta keterampilan dalam membuat suatu rencana intervensi yang nantinya dapat menjadi rekomendasi program bagi Desa Soreang.

Adapun isu beserta dengan rencana intervensi yang praktikan lakukan, yaitu dalam profil analisis jaminan sosial, praktikan mengangkat isu tentang kepesertaan PRSE dalam penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan yang masih sangat di Desa Soreang, yang penyebab utamanya, yaitu rendahnya pemahaman PRSE terkait program bantuan yang ada, serta penyebab lainnya, yaitu belum adanya pembaruan syarat administrasi oleh para PRSE. Adapun rencana intervensi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan program Sosialisasi dan Pendampingan kepada PRSE terkait kepesertaannya dalam penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sehingga sasaran menjadi paham dan juga mau untuk mengurus administrasi sebagai syarat pengajuan bantuan iuran jaminan kesehatan tersebut.

Dalam profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan mengangkat isu tentang penyelenggaraan PUB untuk bantuan kemasyarakatan di Desa Soreang yang belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Penyebab utama masalah ini, yaitu belum adanya sosialisasi kepada Karang Taruna selaku penggerak dalam kegiatan PUB, mengenai syarat dan ketentuan penyelenggaraan PUB yang baik dan benar. Penyebab kedua, kurangnya pengetahuan Karang Taruna terkait syarat dan ketentuan PUB tersebut, sehingga mereka berfikir bahwa kegiatan PUB itu tidak memerlukan syarat dan ketentuan. Adapun rencana intervensi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan program “Peningkatan Pelaksanaan PUB Yang Berkualitas Bersama Karang Taruna Cerdas” yang dilakukan dengan penguatan dan pendampingan dalam penyusunan syarat-syarat penyelenggaraan PUB.

Dalam profil analisis pemberdayaan sosial, praktikan mengangkat isu tentang kegiatan usaha oleh Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang belum memiliki manajemen usaha yang baik, sehingga kesulitan dalam mengelola modal. Adapun penyebab utama masalah ini yaitu tidak adanya sosialisasi dan pelatihan manajemen usaha pada PEKKA itu sendiri.

Adapun rencana intervensi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan program “Peningkatan Keterampilan Usaha Perempuan Mandiri”. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pengedukasian dan juga pelatihan terkait manajemen usaha, yang di dalamnya terdapat pelatihan terkait pemanfaatan modal, pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, bagaimana mengelola keuangan usaha, dan sebagainya.

Dalam profil analisis penataan lingkungan sosial, praktikan mengangkat isu tentang Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang belum optimal. Adapun penyebab utama masalah ini, yaitu belum adanya penataan lingkungan untuk perlindungan dan pengoptimalan pemeliharaan irigasi. Penyebab lainnya yaitu kesadaran masyarakat yang kurang dalam pemeliharaan jaringan irigasi dan juga sifat antroposentrisme dari beberapa masyarakat. Adapun rencana intervensi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan program “Masyarakat Peduli Lingkungan”. Program ini dilakukan dengan membentuk Poklisa (Kelompok Peduli Sampah) yangmana poklisa ini beranggotakan para pemuda di Desa Soreang, khususnya yang tergabung dalam Karang Taruna. Di mana kegiatan dari program tersebut adalah 3P (pembersihan, pemasangan filter air, dan penghiasan). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penataan lingkungan fisik dan juga sosial, di mana ketika jaringan irigasi sudah bersih, terfilter, dan juga indah, masyarakat dengan sendirinya akan *segar* untuk mencemari atau bahkan menutup aliran irigasi tersebut.

Dalam profil analisis penanggulangan bencana, praktikan mengangkat isu terkait dengan Pengendalian Vektor tingkat pemukiman Pasca Bencana Banjir yang belum merata, sehingga perlu adanya penegndalian vektor pada tingkat pemukiman. Adapun penyebab utamanya, yaitu keterbatasan air untuk pengendalian vektor pada tiap pemukiman, lalu penyebab lainnya, yaitu terdapat indikator-indikator kunci untuk melakukan pengendalian vektor pada tingkat pemukiman. Dari isu tersebut, praktikan menyusun suatu program sebagai bentuk rencana intervensi, yaitu program ”Pengendalian Vektor Terpadu (PVT)” Kegiatan yang dilakukan dalam program ini, yaitu edukasi, pelatihan, dan juga fasilitasi, sehingga rumah tangga dan pribadi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga alat untuk melakukan oengendalian vektor pada tingkat rumah tangga dan pribadi.

3.2. Rekomendasi

Praktikum laboratorium dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan dan membuat rencana intervensi terkait dengan 5 profil lulusan (Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana). Namun masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan-kegiatan praktikum selanjutnya.

a. Program Studi

Rekomendasi untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman penulisan yang sudah fix di awal kegiatan sehingga tidak ada perubahan dan perbedaan antara format penulisan di pedoman dengan format penulisan yang ditugaskan selanjutnya.
- 2) Memberikan waktu lebih terutama untuk penulisan laporan, mengingat mahasiswa masih menjalankan kegiatan perkuliahan sehingga banyak tugas yang harus dikerjakan.
- 3) Jadwal bimbingan selama praktikum dengan dosen pembimbing dijadwalkan dari awal sehingga tidak mendadak.
- 4) Pemberian materi mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan di awal, tidak mengikuti jadwal pengajaran, karena sering mendapatkan materi setelah selesai menyusun laporan.

b. **Politeknik Kesejahteraan Sosial**

Rekomendasi untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan fungsi controlling kepada mahasiswa praktikum agar lebih terarah dalam pelaksanaan praktikum
- 2) Menjalinkan kemitraan yang lebih luas agar dapat memperluas jaringan kerja bagi para lulusan POLTEKESOS Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Merdeka.com. (2022 , Oktober 2). *Mengenal Biosentrisme dan Antroposentrisme, Ini Penjelasannya*. Retrieved from www.merdeka.com:
<https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-biosentrisme-dan-antroposentrisme-ini-penjelasannya-klm.html>
- Merdeka.com. (2022, April 29). *Konsep Lingkungan Hidup dan Berbagai Masalahnya, Perlu Diketahui*. Retrieved from www.merdeka.com:
<https://www.merdeka.com/jateng/konsep-lingkungan-hidup-dan-berbagai-masalahnya-perlu-diketahui-klm.html>
- Pitan, T. S. (2023). *Manusia dan Lingkungan*. Retrieved from spada.uns.ac.id:
[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/669800/mod_resource/content/1/Eko logi%20dan%20Budaya%20Arsitektur%20%2802%29.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/669800/mod_resource/content/1/Eko%20logi%20dan%20Budaya%20Arsitektur%20%2802%29.pdf)
- Setiawan, I. (2023). *Manusia dan Lingkungan* . *upi.edu*, 1.
- simantu. (2023). Modul Pengenalan Sistem Irigasi. *simantu.pu.go.id*, 13-16.
- Webmaster. (2020, November 19). *Kenali Fungsi Dan Macam-Macam Lingkungan Hidup*. Retrieved from dlh.semarangkota.go.id:
<https://dlh.semarangkota.go.id/kenali-fungsi-dan-macam-macam-lingkungan-hidup/#:~:text=Lingkungan%20hidup%20terbagi%20menjadi%20dua,alami%20dan%20lingkungan%20hidup%20buatan.&text=Lingkungan%20hidup%20alami%20adalah%20lingkungan,tanpa%20ada%20campu%20tan>
- Suhaemi, P. N. (2022). LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM. 47-48. (2022). "Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD". (2022). Retrieved from . <https://bkd.kepahiangkab.go.id/blog/mengenal-hibah-dan-bantuan-sosial-yangbersumber-dari-apbd-kabupaten-kepahiang/> (2023).
- Retrieved from kemenkeu.go.id:
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/datapublikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html> Anggaran Bansos APBN. (2022).
- Retrieved from cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220414170743-532-784956/sri-mulyanisiapkan-anggaran-bansos-rp349-triliun-di-apbn2023#:~:text=Menteri%20Keuangan%20Sri%20Mulyani%20mengalokasikan,Rp431%20triliun%20di%20APBN%202022.>
- Bethesda Sitanggang, A. T. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN HIBAH DAN. *media.neliti*, 11-18.

- Dinas Sosial Kabupaten Bogor. (2023). *Pengertian PSKS* . Retrieved from [dinsos.bogorkab.go.id: https://dinsos.bogorkab.go.id/psks-potensi-dan-sumber-kesejahteraan-sosial/#:~:text=Karang%20Taruna%20adalah%20Organisasi%20sosial,gerak%20di%20bidang%20usaha%20kesejahteraan](https://dinsos.bogorkab.go.id/psks-potensi-dan-sumber-kesejahteraan-sosial/#:~:text=Karang%20Taruna%20adalah%20Organisasi%20sosial,gerak%20di%20bidang%20usaha%20kesejahteraan)
- Dinas Sosial Kabupaten Tegal. (2023). *Pengumpulan uang dan barang*. Retrieved from [dinsos.tegalkab.go.id: https://dinsos.tegalkab.go.id/halaman/detail/pengumpulan-uang-atau-barang](https://dinsos.tegalkab.go.id/halaman/detail/pengumpulan-uang-atau-barang)
- Tambakromo, S. (2022). *Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013*. Retrieved from [desa.id: https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013](https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013)
- Undang-undang No.9 Tahun 1961
- 11, K. (2023). Profil Analisi Jaminan Sosial. *Booklet Pra-praktikum Laboratorium Poltekesos*, 6-7.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from [Kbbi.web.id: https://kbbi.web.id/patuh](https://kbbi.web.id/patuh)
- Maha, Y. (2016, Mei 21). *Social Worker*. Retrieved from [yurikamaha.blogspot: http://yurikamaha.blogspot.com/2016/05/sistem-sumber-menurut-allen-pincus-and.html](http://yurikamaha.blogspot.com/2016/05/sistem-sumber-menurut-allen-pincus-and.html)
- OJK. (2023). BPJS Kesehatan. *sikapi uangmu*.
- Rahayu, Y. (2013, November 22). *metode COCD dalam pekerjaan sosial*. Retrieved from [yrahayu077.blogspot: http://yrahayu077.blogspot.com/2013/11/metode-cocd-dalam-pekerjaan-sosial.html](http://yrahayu077.blogspot.com/2013/11/metode-cocd-dalam-pekerjaan-sosial.html)
- Suhaemi, P. N. (2022). LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM. 47-48.

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Kegiatan



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 0141/7.1.8/DL.02.01/01/2023 Bandung, 13 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Izin Melaksanakan kegiatan
Praktikum Laboratorium**

**Yth. Kepala Desa Soreang
Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung
Jawa Barat
Di
Soreang**

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (praktikum). Kegiatan praktikum laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan asesmen dan rencana intervensi pekerjaan sosial di masyarakat sesuai profil lulusan. Pada proses pelaksanaannya mahasiswa akan menerapkan keterampilan dalam melakukan tahapan praktik pekerjaan sosial yang dimulai dengan melakukan pendekatan awal, kemudian asesmen, dan diakhiri dengan penyusunan rencana intervensi,.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merencanakan menempatkan peserta praktikum mahasiswa Poltekesos Bandung di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat yang rencana pelaksanaan praktikumnya dimulai tanggal 8 Februari s.d. 15 April 2023 (nama mahasiswa praktikan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI ;
2. Pertiinggal.

Lampiran

Nomor : 0141 /7.1.8/DL.02.01/01/2023

Tanggal : 13 Januari 2023

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PRAKTIKUM LABORATORIUM
DI DESA SOREANG KECAMATAN SOREANG
KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT**

NO.	NAMA MAHASISWA	NRP	DOSEN PEMBIMBING
1	Suhaila Sekar Ayu	2003019	A. Nelson Aritonang, Ph.D
2	Akhmad Sulthon Iman Naufal	2003025	Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp
3	Metiara Cahya Ningrum	2003063	
4	Dinda Ratna Wulan	2003119	
5	Yuni Sarasati	2003023	
6	Siti Amelia	2003115	
7	Erlang Adhi Negara	2003116	
8	Muhammad Brilian Salafuddin	2003114	



Lampiran II : Rundown Acara

Rundown 1

RUNDOWN KEGIATAN				
“Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan”				
Tanggal : 3 Maret 2023				
Tempat : Aula Kantor Desa Soreang				
✚✚ <i>Tabel 2.8 Susunan Acara</i>				
No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1	07.00-08.00	60'	Registrasi peserta	Disiapkan daftar hadir oleh divisi acara
2	08.00-08.05	5'	Pembukaan acara	MC
3	08.05-08.10	5'	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dirijen
4	08.10-08.20	10'	Sambutan dari Kepala Desa	Kepala Desa
5	08.20-08.30	10'	Sambutan Ketua Program	Ketua Program
6	08.30-09.15	45'	Sosialisasi Jaminan Sosial	Dinas Sosial
7	09.15-09.30	15'	Tanya Jawab	-
8	09.30-10.30	60'	Sosialisasi Konsep PBI-JK	BPJS Kesehatan
9	10.30-10.45	15'	Tanya Jawab	-
	10.30-11.00	30'	Sosialisasi mengenai mekanisme pendampingan dan fasilitasi untuk PRSE	Praktikan
10	11.00-11.15	15'	Tanya jawab	-
11	11.15-11.20	5'	Penutupan	MC

Rundown 2

RUNDOWN KEGIATAN

**“Peningkatan Pelaksanaan PUB yang Berkualitas
Bersama Karang Taruna Cerdas”**

Tanggal : 2 Mei 2023

Tempat : Aula Kantor Desa Soreang

✚ *Tabel 2.15 Susunan Acara*

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1	07.00-08.00	60'	Registrasi peserta	Disiapkan daftar hadir oleh divisi acara
2	08.00-08.05	5'	Pembukaan acara	MC
3	08.05-08.10	5'	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dirijen
4	08.10-08.20	10'	Sambutan dari Kepala Desa	Kepala Desa
5	08.20-08.30	10'	Sambutan Ketua Program	Ketua Program
6	08.30-10.00	90'	Sosialisasi PUB	Dinas Sosial
7	10.00-10.45	45'	Tanya Jawab	-
8	10.45-10.50	5'	Penutupan	MC

Rundown 3

RUNDOWN KEGIATAN

“ Pengendalian Vektor Terpadu (PVT)”

Tanggal : 2 April 2023

Tempat : Aula Kantor Desa Soreang

Tabel 2.35 Susunan Acara

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1	07.00-08.00	60'	Registrasi peserta	Disiapkan daftar hadir oleh divisi acara
2	08.00-08.05	5'	Pembukaan acara	MC
3	08.05-08.10	5'	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dirijen
4	08.10-08.20	10'	Sambutan dari Kepala Desa	Kepala Desa
5	08.20-08.30	10'	Sambutan Ketua Program	Ketua Program
6	08.30-10.00	90'	Sosialisasi PVT	BPBD
7	10.00-10.45	45'	Tanya Jawab	-
8	10.45-11.30	45'	Pemberian Keterampilan terkait PVT	BPBD
9	10.45-10.50	5'	Penutupan	MC

LAMPIRAN III : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PRAKTIKUM LABORATORIUM DI DESA SOREANG

1. Persiapan Wawancara

- a. Menentukan tema atau topik wawancara.
- b. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara.
- c. Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber (5W+1H).
- d. Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya.
- e. Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber.

2. Melakukan Wawancara

- a. Pastikan alat bantu wawancara (alat tulis dan recording) sudah berfungsi.
- b. Sampaikan tujuan wawancara dengan jelas.
- c. Ajukan satu pertanyaan sekaligus.
- d. Posisikan diri senetral mungkin, jangan menunjukkan emosi berlebihan.
- e. Melakukan dorongan respon dengan anggukan kepala ataupun senyuman.
- f. Menyediakan transisi antar topik.
- g. Mengendalikan wawancara agar tidak menyimpang ke topik pembahasan yang lain.

3. Setelah Wawancara

- a. Pastikan alat bantu wawancara (recording) berfungsi selama wawancara.
- b. Tuliskan pengamatan yang dilakukan selama wawancara.

Lampiran IV : Catatan Hasil Wawancara

Wawancara 1

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Kamis, 09 Februari 2023
Waktu Pelaksanaan	: 11.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Kantor Desa Soreang
Narasumber	: Bapak Iyus Selaku Bidang Pelayanan Publik
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya terkait dengan jaminan sosial dan juga untuk mengetahui jaminan sosial apa saja yang ada di Desa Soreang.

Informasi yang Didapatkan :

- Informasi terkait data desa yang dikirimkan lewat file.
- Masyarakat sering mengurus surat SKTM sebagai salah satu syarat bantuan kesehatan.
- Masyarakat sering mengeluh terkait PBI-JK yang belum turun walaupun sudah mengajukan.
- Mayoritas pekerja di Desa Soreang adalah pekerja bukan penerima upah.
- Mayoritas pekerja bukan penerima upah di Desa Soreang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
- Masyarakat banyak yang belum mengetahui terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Wawancara 2

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Jumat, 09 Februari 2023
Waktu Pelaksanaan	: 11.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Rumah Ibu Tuting
Narasumber	: Ibu Tuting Selaku PSM
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait apa saja yang menjadi keluh kesah masyarakat, khususnya terkait dengan jaminan sosial.

Informasi yang Didapatkan :

- Desa Soreang memiliki 6 jenis PMKS, yaitu WTS, PRSE, Fakir Miskin, Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Pemulung.
- Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial, khususnya BPJS Kesehatan, yaitu terkait banyaknya masyarakat yang memiliki tunggakan dalam BPJS Kesehatan, belum meratanya PBI-JK khususnya bagi masyarakat rentan, dan banyak masyarakat yang keliru dalam memahami konsep dari BPJS Kesehatan.
- Mayoritas pekerja di Desa Soreang adalah buruh.
- Terdapat jaminan sosial kemasyarakatan untuk kesehatan dan kematian.

Wawancara 3

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Jumat, 10 Februari 2023
Waktu Pelaksanaan	: 10.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Posyandu
Narasumber	: Ibu Nunung dan Ibu Yeny selaku Puskesmas
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait apa saja yang menjadi kendala masyarakat, khususnya terkait dengan jaminan sosial dan juga untuk mengetahui peran puskesmas dalam jaminan sosial.

Informasi yang Didapatkan :

- Masyarakat tidak mau untuk memperbarui identitas sebagai syarat administrasi pengajuan bantuan jaminan sosial dan terdapat lansia yang kesulitan untuk mengurus administrasi.
- Terdapat beberapa masyarakat yang mendaftarkan dirinya dalam BPJS Kesehatan mandiri karena terdesak.
- Peran kader adalah untuk sosialisasi dan juga kontroling penggunaan BPJS Kesehatan.

Wawancara 4

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Rabu, 15 Februari 2023
Waktu Pelaksanaan	: 13.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Rumah Masyarakat
Narasumber	: Ibu Iis dan Istri Pak Apri
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk validasi dan melihat kondisi masyarakat

Informasi yang Didapatkan :

- Mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya apalagi untuk kebutuhan penunjang seperti kesehatan dan pendidikan.
- Ibu Iis masuk dalam kategori PRSE, memiliki tunggakan BPJS Kesehatan karena perekonomian yang kurang stabil, dan belum mengajukan PBI-JK karena tidak mengetahui akan adanya program tersebut.
- Mak Apri merupakan lansia yang memiliki penyakit cukup parah dan hanya hidup berdua saja. Merasa kesulitan untuk mengakses tempat pelayanan kesehatan publik.

Wawancara 5

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 23 Februari 2023
Waktu Pelaksanaan	: 13.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Kantor Desa Soreang
Narasumber	: Bapak Iyus Selaku Bidang Pelayanan Publik
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait bantuan sosial apa saja yang ada di Desa Soreang dan bagaimana realisasinya

Informasi yang Didapatkan :

- Desa Soreang telah melaksanakan bantuan sosial, yaitu berupa BPNT, PKH, KUBE, Subsidi, Rastra, dan Bantuan Kemasyarakatan.
- Pelaksanaan dari tiap bantuan tersebut sudah cukup baik, namun tetap ada saja yang belum tercover meskipun masuk dalam kriteria penerima bansos.
- Terdapat bantuan sosial kemasyarakatan untuk mengcover masyarakat rentan yang belum mendapat bantuan.
- Banyak masyarakat yang menyalahgunakan dana bantuan.
- Terdapat masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial, khususnya PKH.
- Masih ada ketidaktepat sasaran dalam pendistribusia bansos.

Wawancara 6

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 3 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan	: 10.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Kantor Bappelitbangda Kabupaten Bandung
Narasumber	: Bapak Ganjar Selaku Ketua Karang Taruna
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait bantuan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh karang taruna

Informasi yang Didapatkan :

- a. Karang Taruna Desa Soreang memiliki 33 anggota yang dibagi kedalam beberapa divisi.
- b. Karang Taruna Desa Soreang merupakan Karang Taruna yang cukup aktif dan memiliki peran yang baik dalam pengembangan desa
- c. Karang Taruna Desa Soreang memiliki beberapa rencana program yang sangat baik, diantaranya adalah program pemuda peduli lingkungan, program pemberdayaan untuk pekerja konveksi, program pemberdayaan untuk para pengangguran, dan program yang telah dilaksanakan, yaitu bantuan sosial kemasyarakatan.
- d. Bantuan sosial ini dilaksanakan untuk mengcover masyarakat rentan yang belum tercover oleh bantuan sosial dari masyarakat.
- e. Bantuan sosial ini sumber dananya berasal dari dana hibah masyarakat, instansi sosial, instansi kesehatan, dan industri konveksi yang digalangkan oleh karang taruna itu sendiri.
- f. Program ini merupakan kerja sama antara karang taruna dengan pihak desa dan kader.
- g. Sistematika program ini, yaitu dana dari para donatur dikumpulkan ke dalam satu rekening, lalu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- h. Terdapat kendala dalam program ini, yaitu minat pemuda yang kurang untuk ikut serta dalam kegiatan program.
- i. Program ini juga belum memiliki rencana yang jelas, pengorganisasian yang jelas, dan juga belum ada pelaporan yang jelas.

Wawancara 7

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 9 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan	: 16.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Rumah Ibu Tuting
Narasumber	: Ibu Tuting Selaku PSM Desa Soreang
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan yang ada di Desa Soreang

Informasi yang Didapatkan :

- a. Karang Taruna Desa Soreang memiliki 33 anggota yang dibagi kedalam beberapa divisi.
- b. Karang Taruna Desa Soreang merupakan Karang Taruna yang cukup aktif dan memiliki peran yang baik dalam pengembangan desa
- c. Karang Taruna Desa Soreang memiliki beberapa rencana program yang sangat baik, diantaranya adalah program pemuda peduli lingkungan, program pemberdayaan untuk pekerja konveksi, program pemberdayaan untuk para pengangguran, dan program yang telah dilaksanakan, yaitu bantuan sosial kemasyarakatan.
- d. Bantuan sosial ini dilaksanakan untuk mengcover masyarakat rentan yang belum tercover oleh bantuan sosial dari masyarakat.
- e. Bantuan sosial ini sumber dananya berasal dari dana hibah masyarakat, instansi sosial, instansi kesehatan, dan industri konveksi yang digalangkan oleh karang taruna itu sendiri.
- f. Program ini merupakan kerja sama antara karang taruna dengan pihak desa dan kader.
- g. Sistematika program ini, yaitu dana dari para donatur dikumpulkan ke dalam satu rekening, lalu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- h. Terdapat kendala dalam program ini, yaitu minat pemuda yang kurang untuk ikut serta dalam kegiatan program.
- i. Program ini juga belum memiliki rencana yang jelas, pengorganisasian yang jelas, dan juga belum ada pelaporan yang jelas.

Wawancara 8

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 9 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan	: 16.30 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Rumah Ibu Idas
Narasumber	: Ibu Idas Selaku Anggota Program Usaha PEKA
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan program usaha PEKA dan apa yang sudah dirasakan oleh anggota setelah adanya program tersebut.

Informasi yang Didapatkan :

- Program usaha PEKA saat ini memiliki jumlah anggota, yaitu 10 Perempuan Kepala Keluarga.
- Program ini sudah cukup membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan juga untuk membantu perekonomian mereka.
- Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program usaha ini

Wawancara 9

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 14 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan	: 12.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Rumah Ibu Eti
Narasumber	: Ibu Eti Selaku Pengelola Program Usaha PEKA
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan program usaha PEKA.

Informasi yang Didapatkan :

- Program usaha PEKA saat ini merupakan program yang dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, sebagai upaya melindungi para Perempuan Kepala Keluarga dari resiko sosial dan ekonomi.
- Awal pembentukannya, yaitu dengan mengumpulkan para perempuan kepala keluarga, baik yang berstatus janda maupun tidak. Lalu diberi modal usaha sebesar 10 Juta di awal, serta modal pengembangan sebesar 5 Juta.
- Program ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu.
- Bentuk usahanya adalah usaha Catering.

Wawancara 10

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 30 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan	: 13.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Kantor Desa Soreang
Narasumber	: Pak Iyus Selaku Bidang Pelayanan Publik
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait kondisi daerah irigasi yang ada di Desa Soreang.

Informasi yang Didapatkan :

- Desa Soreang memiliki jaringan irigasi yang berfungsi sebagai pengendalian dan pemanfaatan air berlebih untuk tanaman, pertanian, dan perkebunan.
- Masyarakat sering membuang limbah rumah tangga ke daerah irigasi sehingga menyebabkan penyumbatan jaringan irigasi.
- Terdapat penutupan irigasi oleh warga untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan banjir pada Bulan April.
- Karang Taruna memiliki rencana program untuk melakukan pembersihan dan penghiasan jaringan irigasi.

Wawancara 11

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 30 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan	: 13.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Kantor Desa Soreang
Narasumber	: Pak Husni Selaku Anggota Karang Taruna
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui terkait kondisi daerah irigasi dan mengetahui lebih dalam terkait rencana program yang dimiliki oleh Karang Taruna

Informasi yang Didapatkan :

- Karang Taruna Desa Soreang memiliki rencana program berupa pembersihan dan juga penghiasan daerah irigasi yang ada di hulu irigasi, sebagai upaya penataan lingkungan dan sosial bagi masyarakat didaerah irigasi lainnya.
- Penghiasan akan meliputi pengecatan dan pemberian tanaman di sekitar daerah hulu irigasi.
- Selain itu, Karang Taruna juga akan melakukan pemasangan filter air di beberapa jaringan irigasi, guna membuat aliran air menjadi bersih tanpa sampah dan meminimalisir penyumbatan.

Wawancara 12

Laporan Hasil Wawancara

Hari /Tanggal	: Selasa, 30 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan	: 13.00 WIB-Selesai
Tempat Pelaksanaan	: Kantor Desa Soreang
Narasumber	: Pak Iyus dan Pak Rohman
Pewawancara	: Yuni Sarasati
Tujuan Wawancara	: Untuk mengetahui lebih dalam terkait bencana banjir yang pernah terjadi beberapa kali di Desa Soreang dan juga mengetahui apakah sudah ada pengendalian vektor pada tingkat pemukiman ataupun tingkat rumah tangga dan pribadi.

Informasi yang Didapatkan :

- a. Desa Soreang beberapa kali terkena bencana banjir yang disebabkan oleh meluapnya air di jaringan irigasi.
- b. Irigasi meluap karena terdapat sumbatan di beberapa jaringannya dan dibarengi dengan curah hujan yang tinggi.
- c. Sumbatan tersebut karena masyarakat sering membuang limbah rumah tangga ke daerah irigasi, serta ada warga yang menutup jaringan irigasi untuk membangun ruko.
- d. Banjir yang terjadi pada bulan April kemarin, meliputi wilayah RW 1,2,3,4,7, dan 8. Banjir setinggi 1 meter dengan dampak kerusakan meliputi kerusakan rumah warga, fasilitas umum, dan jalan.
- e. Pasca Bencana Banjir tersebut, pengendalian vektor tingkat pemukimannya hanya di RW 1 saja, karena memiliki sumber air yang banyak untuk penyemprotan.
- f. Untuk pengendalian vektor tingkat rumah tangga dan pribadi belum sepenuhnya dilakukan dan juga belum terpadu.

